



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD Kota Bandar Lampung, maka penyusunan LKjIP Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kota Bandar Lampung Tahun 2021 menjadi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu Wali Kota kepada Presiden melalui Kementerian PAN-RB yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil program/kegiatan Tahun 2021 yaitu tahun pertama pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih periode Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya sebagaimana pelaksanaan pada periode tahun sebelumnya, maka dokumen Laporan Kinerja yang tertuang dalam buku ini akan memuat berbagai informasi berkaitan dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama Tahun Anggaran 2021.

1.1.2. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 ini berisikan mengenai pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung berikut indikator kerjanya, penjelasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta memuat perbandingan pencapaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2022.

1.2. KONDISI KOTA BANDAR LAMPUNG

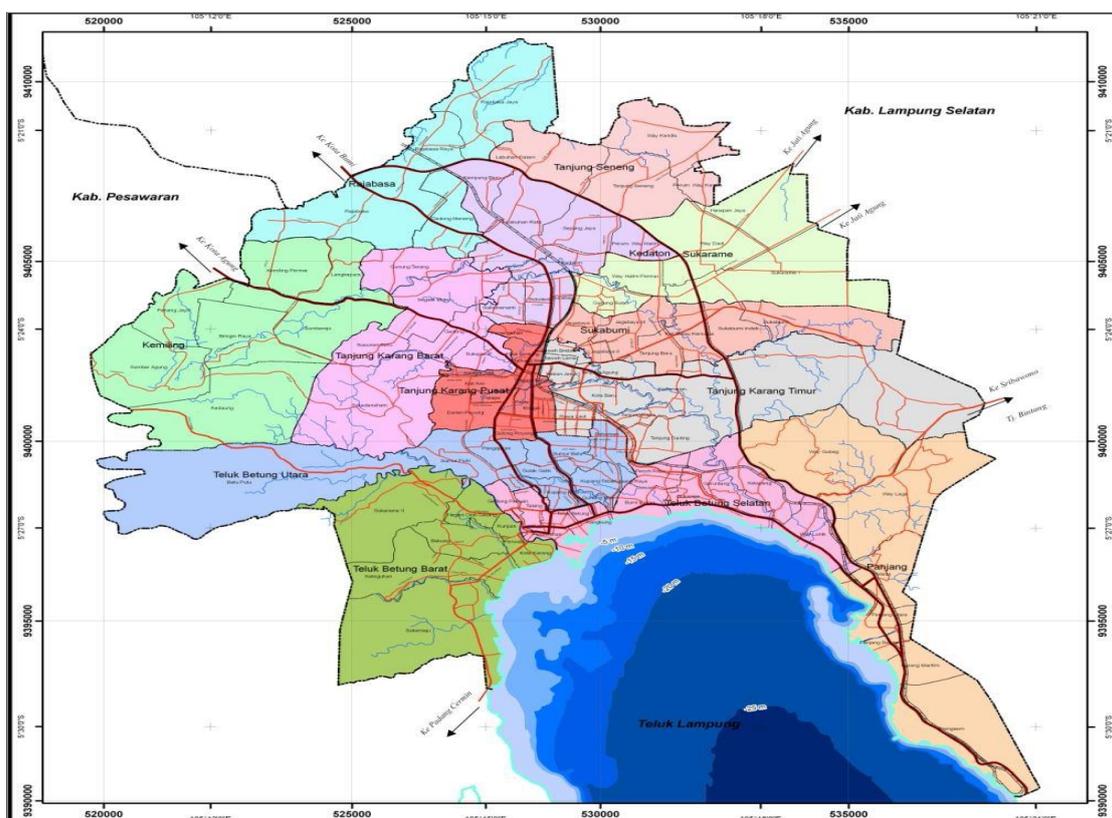
1.2.1. Kondisi Geografis

Kota Bandar Lampung berada di bagian selatan Provinsi Lampung (Teluk Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Ketibung Kabupaten Pesawaran serta Teluk Lampung.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 1.1
PETA ADMINISTRASI KOTA BANDAR LAMPUNG



1.2.2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kota Bandar Lampung adalah 197,22 km² atau 19.722 hektar. Wilayah Kota Bandar Lampung dibagi menjadi beberapa wilayah administratif yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, 288 Lingkungan dan 2.776 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
DATA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA BANDAR LAMPUNG

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
1.	Teluk Betung Barat	1.826,49	5	14	98
2.	Teluk Betung Timur	206,55	6	14	104
3.	Teluk Betung Selatan	348,75	6	14	141
4.	Bumi Waras	451,69	5	12	149
5.	Panjang	1.364,92	8	20	227

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
6.	Tanjung Karang Timur	206,55	5	11	109
7.	Kedamaian	834,44	7	16	126
8.	Teluk Betung Utara	437,76	6	12	162
9.	Tanjung Karang Pusat	345,11	7	14	151
10.	Enggal	278,49	6	13	120
11.	Tanjung Karang Barat	1.153,82	7	16	137
12.	Kemiling	2.133,11	9	20	250
13.	Langkapura	529,57	5	11	76
14.	Kedaton	377,11	7	17	139
15.	Rajabasa	1.289,70	7	14	111
16.	Tanjung Senang	927,83	5	11	115
17.	Labuan Ratu	609,85	6	12	101
18.	Sukarame	1.068,22	6	13	117
19.	Sukabumi	2.509,83	7	16	157
20.	Way Halim	624,95	6	16	184
JUMLAH		18.377,04	18.377,04	288	2.776

Sumber : Perda RTRW Kota Bandar Lampung, 2021

1.2.3. Topografi

Secara Topografis Kota Bandar Lampung mempunyai topografi sangat beragam, mulai dari dataran, pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung. Daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Wilayah pantai terdapat disekitar Telukbetung dan Panjang dan Pulau-Pulau kecil di bagian selatan;
- 2) Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame dibagian utara;
- 3) Wilayah perbukitan terdapat disekitar Telukbetung bagian Utara;
- 4) Wilayah dataran dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjungkarang bagian Barat yaitu Gunung Betung dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam. Kondisi geografis wilayah yang berbukit di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20 persen dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-40 persen. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0 persen diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40 persen diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.

1.2.4. Karakteristik Wilayah

Sebagai Ibukota Provinsi Lampung, Bandar Lampung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya karena berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera. Kendaraan dari daerah lain di Pulau Sumatera harus melewati Bandar Lampung bila menuju ke Pulau Jawa.

Peta Geologi Lembar Tanjung Karang (Andimangga dkk, 1993), menunjukkan kondisi geologi di Kota Bandar Lampung, dimana di dalamnya terlihat jelas beberapa patahan yang melintasi Kota Bandar Lampung. Patahan-patahan tersebut cenderung merupakan patahan berpotensi aktif, tempat tertimbunnya energi kinetis yang setiap saat terlepas yang akan menimbulkan guncangan gempa dan merupakan suatu ancaman terhadap Kota Bandar Lampung. Kondisi tanah yang mendominasi merupakan tanah bekas endapan pantai dan sungai yang tersebar disekitar Teluk Lampung dan di sekitar Tanjung Karang didominasi oleh tanah lapukan hasil kegiatan gunung api muda dari Formasi Lampung yang umumnya batuan tuffa. Sementara di tengah-tengah Kota Bandar Lampung muncul bukit bukit mencuat dari tufa dan andesi.

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Berdasarkan akuifer yang dimilikinya, kondisi air tanah di Kota Bandar Lampung dapat dibagi dalam beberapa bagian berdasarkan porositas dan permeabilitasnya yaitu:

- a. Akuifer dengan produktifitas sedang, berada di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur;
- b. Air tanah dengan akuifer produktif, berada di Kecamatan Kedaton, Tanjung Senang, bagian selatan Kecamatan Kemiling, Bagian Selatan Tanjung Karang Barat, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Sukabumi;
- c. Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas, berada di Bagian Utara Kecamatan Kemiling, bagian utara Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Telukbetung Utara, dan sebagian kecil Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- d. Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas, berada di sebagian besar Kecamatan Rajabasa dan Tanjung Karang Timur;
- e. Akuifer dengan produktifitas rendah, berada di bagian utara Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan Bagian Barat Kecamatan Telukbetung Selatan;
- f. Air tanah langka, berada di Kecamatan Panjang.

Menurut Schmidt dan Fergusson (1951) klasifikasi iklim di Kota Bandar Lampung adalah Kategori tipe A, sedangkan menurut zone agroklimat Oldeman (1978) tergolong Zone D3, yang berarti lembab sepanjang tahun. Curah hujan berkisar antara 2.257–2.454 mm/tahun. Jumlah hari hujan 76-166 hari/tahun. Kelembaban udara berkisar 60-85 persen dan suhu udara 23- 37°C. Kecepatan angin berkisar 2,78-3,80 knot dengan arah dominan dari Barat (November-Januari), Utara (Maret-Mei), Timur (Juni-Agustus) dan Selatan (September-Oktober).

Berikut ini adalah data yang menunjukkan kondisi iklim di Kota Bandar Lampung :

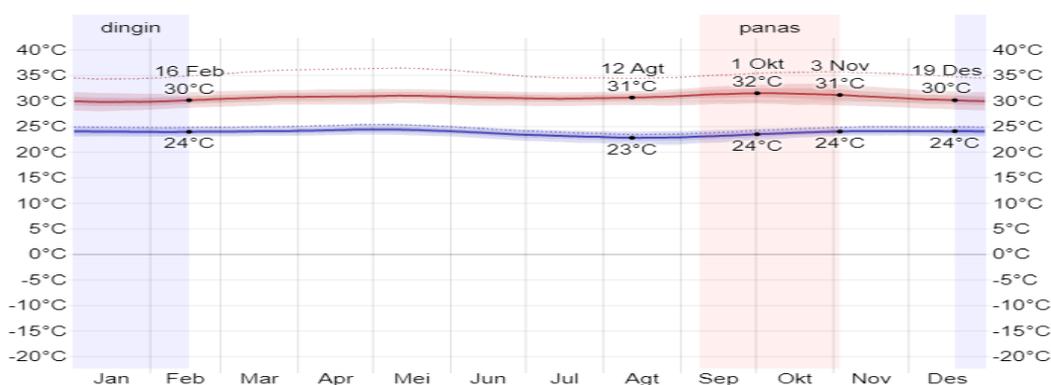
Tabel 1.2.
KONDISI IKLIM KOTA BANDAR LAMPUNG

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F)	29 (-84)	30 (-86)	31 (-88)	31 (-88)	31 (-88)	31 (-88)	30 (-86)	30 (-86)	30 (-86)	31 (-88)	31 (-88)	30 (-86)	30 (-86)
Rata-rata terendah °C (°F)	22 (-72)	21 (-70)	22 (-72)	22 (-72)	21 (-70)	21 (-70)	21 (-70)	21 (-70)	21 (-70)	21 (-70)	22 (-72)	22 (-72)	21 (-70)
Presipitasi mm (inci)	285 (11.22)	319 (12.56)	301 (11.85)	171 (6.73)	128 (5.04)	122 (4.8)	89 (3.5)	64 (2.52)	82 (3.23)	144 (5.67)	111 (4.37)	304 (11.97)	2.119 (-83,43)

Sumber data : Weather Spark

Suhu rata-rata di Kota Bandar Lampung adalah musim panas berlangsung selama 1,8 bulan, dari 8 September sampai 3 November, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 31°C. Bulan terpanas dalam setahun di Kota Bandar Lampung adalah Mei, dengan rata-rata suhu terendah 31°C dan tertinggi 24°C. Musim dingin berlangsung selama 1,9 bulan, dari 19 Desember sampai 16 Februari, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 30°C. Bulan terdingin dalam setahun di Kota Bandar Lampung adalah Januari dengan rata-rata terendah 24°C dan tertinggi 30°C.

GRAFIK 1.1
RATA-RATA SUHU TERTINGGI DAN TERDINGIN KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber Data : Weather Spark

KET: Suhu rata-rata harian tertinggi (garis merah) dan terdingin (garis biru), dengan pita persentil ke-25 hingga ke-75 dan ke-10 hingga ke-90. Garis putus-putus tipis adalah suhu rata-rata yang dirasakan.

Rata-rata	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Tinggi	30°C	30°C	31°C	30°C								
Suhu	26°C	27°C										
Rendah	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	23°C	23°C	23°C	24°C	24°C	24°C

1.2.5. Perekonomian

Pandemi Covid-19 terjadi yang pada awal tahun 2020-an berdampak sekaligus mengakibatkan perubahan tatanan sosial dan kinerja ekonomi di sebagian besar negara yang ada di dunia termasuk negara Indonesia, termasuk pula Provinsi Lampung, dan khususnya Kota Bandar Lampung (Badan Pusat Statistik, 2021). Penetapan penyebaran virus Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam terdapat dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan di berbagai kelompok masyarakat. Tidak hanya kesehatan tetapi juga memberikan dampak multisector termasuk sosial dan ekonomi yang semakin lama dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang terjadi membuat masyarakat mengalami perubahan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, guna mencegah penularan Corona virus ini.

Salah satu upaya mencegah penyebaran Covid 19 adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan secara nasional. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti liburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, serta pertahanan dan keamanan. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan tekanan yang berat pada perekonomian Kota Bandar Lampung.

Adanya pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan aktivitas ekonomi yang meliputi proses produksi, konsumsi dan distribusi menjadi terganggu. Sektor ekonomi riil yang menjadi roda penggerak perekonomian dan andalan penerimaan PAD Kota Bandar Lampung dari sektor pariwisata, UMKM, perdagangan dan jasa pun nyaris terhenti total. Tingkat hunian hotel-hotel di Kota Bandar Lampung menurun drastis pada titik terendah berkisar 5%-10%. Sementara pelaku usaha UMKM kesulitan untuk memasarkan produknya karena permintaan menurun tajam. Sehingga para pelaku usaha UMKM mengalami penurunan omset dan pendapatan yang cukup signifikan. Akibatnya beberapa usaha UMKM ada yang tutup total, berhenti sementara, beralih cara penjualan secara daring dan melakukan diversifikasi usaha agar dapat bertahan dengan memproduksi barang atau alat kesehatan seperti masker, APD, faceshield dan cairan desinfektan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara untuk pusat-pusat perdagangan super market, restoran dan hiburan ditutup sementara waktu selama masa pemberlakuan PSBB. Kecuali bagi super market yang menyediakan kebutuhan pokok berupa bahan-bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat masih diperbolehkan untuk buka dengan penerapan prosedur kesehatan yang ketat dan pembatasan waktu jam buka usaha.

Pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan berkurangnya jumlah transaksi barang dan jasa di pusat-pusat perbelanjaan, hotel, restoran dan tempat hiburan. Berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang di rumahkan bahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Sehingga diprediksikan jumlah pengangguran meningkat karena kehilangan pekerjaan, kemampuan daya beli masyarakat menurun karena kehilangan pendapatan.

Akibat dari menurunnya kemampuan daya beli masyarakat menyebabkan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi, sehingga kontribusinya menurun. Investasi dan kegiatan ekspor impor Kota Bandar Lampung turut terdampak mengalami penurunan, sehingga menambah semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.

Ketidakpastian perekonomian yang tinggi akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid 19 berdampak pada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dalam waktu bersamaan. Upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi pada tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya berhasil.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan PDRB Atas Dasar Harga berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2021 sebagai alat untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA BANDAR LAMPUNG (PERSEN) 2017-2021**

NO	17 Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan (Persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,28	-0,35	1,04	-0,70	- 0,12
2	Pertambangan dan penggalian	6,47	6,23	5,51	4,38	-4,43
3	Industri Pengolahan	6,25	6,12	6,95	-4,36	- 4,19
4	Pengadaan listrik dan gas	5,82	5,45	6,51	5,23	0,26
5	pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur	4,13	1,73	5,43	5,29	6,80
6	Konstruksi	10,09	9,91	5,56	0,01	4,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,60	4,19	6,09	-10,00	6,92
8	Transportasi dan pergudangan	6,30	6,48	6,94	-4,26	2,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,03	7,67	8,56	-12,38	0,46
10	Informasi dan Komunikasi	9,91	9,96	8,01	8,76	5,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,85	2,15	3,23	2,15	0,02
12	Real Estate	8,31	7,16	5,83	-1,30	0,40
13	Jasa Perusahaan	5,25	4,59	4,41	-2,96	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,66	5,35	4,79	5,20	1,97
15	Jasa Pendidikan	6,95	7,03	7,73	7,50	1,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,49	5,89	7,02	11,23	2,70
17	Jasa Lainnya	7,00	7,78	7,84	-4,05	-1,60
	PDRB	6,28	6,20	6,17	-1,88	3,07

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain 2021

Pada tahun 2021 angka PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan Kota Bandar Lampung sebesar 61.502,42 miliar rupiah. Ekonomi Kota Bandar Lampung 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sektor Industri Pengolahan , yaitu sebesar 21,09 persen. Selanjutnya disusul oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,80 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 13,13 persen, konstruksi sebesar 11,42 persen, informasi dan komunikasi sebesar 6,33 persen, real estate sebesar 5,88 persen serta adminisitrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 5,75 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen. Berikut tabel PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kota Bandar Lampung tahun 2017-2021 :

Tabel 1.4

**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017-2021**

NO	17 Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,08	3,85	3,70	3,76	3,71
2	Pertambangan dan penggalian	3,39	3,36	3,34	3,56	3,32
3	Industri Pengolahan	21,26	21,18	21,27	20,84	21,09
4	Pengadaan listrik dan gas	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur	0,29	0,28	0,27	0,29	0,29
6	Konstruksi	10,70	11,06	10,95	10,98	11,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,19	14,15	14,44	13,34	13,80
8	Transportasi dan pergudangan	13,72	13,65	13,54	13,29	13,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,82	2,85	2,90	2,57	2,49
10	Informasi dan Komunikasi	5,71	5,87	5,90	6,43	6,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	5,13	4,97	5,12	5,10
12	Real Estate	5,63	5,81	5,97	6,03	5,88
13	Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,75	5,66	5,51	5,92	5,75
15	Jasa Pendidikan	3,14	3,13	3,20	3,66	3,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,86	1,86	2,10	2,10
17	Jasa Lainnya	1,68	1,69	1,74	1,64	1,56
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung dalam angka 2021

Dilihat dari tabel 1.4 diatas pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung selama periode 2017-2021 didominasi oleh dua lapangan usaha, yaitu industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Akan tetapi meskipun peranannya tinggi, selama 2017-2021 kedua lapangan usaha tersebut cenderung menunjukkan peranan yang tidak stabil/fluktuatif. Sebaliknya, lapangan usaha informasi dan komunikasi serta real estate peranannya berangsur-angsur meningkat. Sementara lapangan usaha konstruksi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat menggambarkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kota Bandar Lampung ke kategori jasa-jasa. Besarnya nominal kontribusi setiap sektor PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

GRAFIK 1.2
NOMINAL PDRB KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN LAPANGAN USAHA TAHUN 2021 (ATAS DASAR BERLAKU)



Sumber : BPS Kota Bandar Lampung dalam angka 2021

Berikut keterangan grafik 1.2 PDRB Kota Bandar Lampung berdasarkan lapangan usaha tahun 2021 (atas dasar berlaku) dengan nominal angka (miliar rupiah) :

PDRB 2021	NOMINAL (MILIAR)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.283,14
Pertambangan dan Penggalian	2.040,72
Industri Pengolahan	12.968,66
Pengadaan Listrik dan Gas	70,28
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	181,28
Reparasi Mobil dan Kontruksi	7.021,00
Perdagangan Besar dan Eceran	8.487,47
Transportasi dan Pergudangan	8.073,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.531,97
Informasi dan komunikasi	3.892,20
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.138,45
Real Estate	3.616,49
Jasa Perusahaan	210,78
Jasa Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan	3.535,94
Jasa Pendidikan	2.196,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan social	1.294,52
Jasa Lainnya	959,19
PDRB	61.502,42

Berdasarkan data PDRB Lapangan Usaha Kota Bandar Lampung Tahun 2021, dapat dilihat gambaran struktur ekonomi Kota Bandar Lampung secara keseluruhan.

PDRB atas lapangan usaha disusun dari nilai tambah 17 (tujuh belas) lapangan usaha. Sejak tahun 2017 kategori industri pengolahan merupakan kategori dengan persentase kontribusi terbesar. Pada tahun 2021 kategori ini berperan sebesar 12.968,66 miliar rupiah atau (21,09) persen. Kategori yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah kategori pedangan besar dan eceran yaitu sebesar 8.487,47 miliar rupiah atau (13,80) persen dari total pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung. Kategori Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi terbesar ketiga, yaitu sebesar 8.073,83 miliar rupiah atau (13,13) persen dari total PDRB 2021.

1.2.6. Bidang Keuangan Daerah

Desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang Kepala Daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun anggaran 2021 setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp.2.849.790.114.635,84 dengan komposisi belanja operasi Rp2.086.065.900.713,69, belanja modal Rp 733.724.213.922,15 dan belanja tidak terduga Rp.30.000.000.000,00.

Tabel 1.5
KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021		
		ANGGARAN BELANJA (RP)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.086.065.900.713,69	1.593.087.342.619,21	76,4
2	Belanja Modal	733.724.213.922,15	400.783.886.158,00	54,6
3	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	24.519.891.197,00	81,7
JUMLAH		2.849.790.114.635,84	2.018.371.228.977,21	70,8

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2021

1.2.7. Sosial Budaya

a. Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung dari tahun ketahun cukup mengalami penambahan, akan tetapi pada tahun 2021 ini mengalami penurunan jika pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 1.189.297 jiwa maka berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah berjumlah 1.091.685 jiwa sehingga mengalami penurunan sebesar 0,08%, yang terdiri dari 554972 jiwa penduduk laki-laki dan 536713 jiwa penduduk perempuan.

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2021 secara rinci terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG PER KECAMATAN
DAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Teluk Betung Barat	26804	26355	53159
Teluk Betung Timur	25552	23967	49519
Teluk Betung Selatan	20128	19446	39574
Bumi Waras	30322	28523	58845

Panjang	38556	36864	75420
Tanjung Karang Timur	19919	19411	39330
Kedamaian	27115	26364	53479
Teluk Betung Utara	25690	25064	50754
Tanjung Karang Pusat	26203	25342	51545
Enggal	13091	13290	26381
Tanjung Karang Barat	31666	30756	62422
Kemiling	42488	41264	83752
Langkapura	21165	20553	41718
Kedaton	26804	26355	53159
Rajabasa	27727	26599	54326
Tanjung Senang	30466	29826	60292
Labuhan Ratu	24252	23813	48065
Sukarame	33481	32515	65996
Sukabumi	36317	34643	70960
Way Halim	34687	34006	68693
Total	554972	536713	1.091.685

Sumber: Disduk Kota Bandar Lampung 2021

Sebaran penduduk Kota Bandar Lampung paling banyak berada di Kecamatan kemiling yang berjumlah 83.752 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Enggal dengan jumlah 26.381 jiwa.

Pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahunnya dapat mempengaruhi besarnya persentase munculnya konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak, sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu terus menerus dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

b. Kesempatan Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 adalah 476.469 orang, naik 5,62% pada tahun 2018 menjadi 504.849 orang, kemudian pada tahun 2019 naik sebesar 1,34% menjadi 511.686 orang.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung selama periode 2016-2021 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 tingkat pengangguran mencapai 8,10%, kemudian pada tahun 2017 tetap pada angka 8,10%. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 - 2019 masing – masing sebesar 7,28% dan 7,12%, di tahun 2020 terjadi peningkatan kembali sebesar 8,79% dan di tahun 2021 tingkat pengangguran menjadi sebesar 8,85%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada waktu dalam periode survei. Dalam kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Hal serupa juga terjadi pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut ini gambaran secara lengkap mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun (TPAK) di Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2021

Tabel 1.7

TPAK KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

URAIAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TPAK	63,41	63,41	65,92	65,52	67,79	67,18

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 2021

Jika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sebesar 67,18% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen, TPT berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

URAIAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TPT	8,10	8,10	7,28	7,12	8,79	8,85

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 2021

Data diatas menunjukkan bahwa TPT Kota Bandar Lampung pada rentang tahun 2016 - 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 TPT Kota Bandar Lampung sebesar 8,85 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 8 orang merupakan pengangguran. Pengangguran terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu yang paling pokok adalah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan memberikan peluang kesempatan kerja baru atau dengan kata lain memberikan kesempatan industri untuk meningkatkan output, peningkatan output tentunya akan meningkatkan penggunaan faktor produksi.

c. Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Tren perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Bandar Lampung selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.9
PERKEMBANGAN ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	70.75	70.84	71.01	71.28	71,37	71,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 2021

Pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa selama periode 2016-2021 Angka Harapan Hidup di Kota Bandar Lampung selalu meningkat. Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup penduduk Kota Bandar Lampung adalah sebesar 71,42. Jika dibandingkan dalam rentang waktu tahun 2016 - 2021, angka tersebut tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Hal tersebut berarti bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, rata-rata penduduk Kota Bandar Lampung dapat bertahan hidup, yaitu sampai usia 71-72 tahun.

1.3. KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Undang-Undang ini lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Bandar Lampung dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat Daerah dan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah.

b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

1.3.2. Kewenangan, Tugas Pokok

a. Kewenangan

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) urusan Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan umum adalah urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Selanjutnya urusan wajib dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan, yaitu:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar terdiri dari :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota Bandar Lampung yang sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan.

1.3.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2022. Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah dan Kecamatan.

Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam rangka menindaklanjuti Permendagri 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka telah dilakukan penataan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dengan cara menggabungkan urusan Bagian Humas dan Bagian Protokol menjadi **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**, menggabungkan urusan Umum dan Bagian Perlengkapan menjadi **Bagian Umum** serta membentuk Bagian Baru yaitu **Bagian Perencanaan dan Keuangan** sehingga terjadi perubahan jumlah Bagian pada Sekretariat Daerah yang sebelumnya berjumlah 12 (duabelas) Bagian menjadi hanya 11 (sebelas) Bagian.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat Kota Bandar Lampung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dinas/Badan Daerah Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana dan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sampai pada akhir tahun 2021 jumlah Dinas Daerah Kota Bandar Lampung berjumlah 23 (dua puluh tiga) Dinas ditambah OPD setingkat Dinas yaitu Satpol PP selanjutnya pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk 1 (satu) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung selanjutnya jumlah Badan Daerah Kota Bandar Lampung adalah berjumlah 6 (enam) Badan.

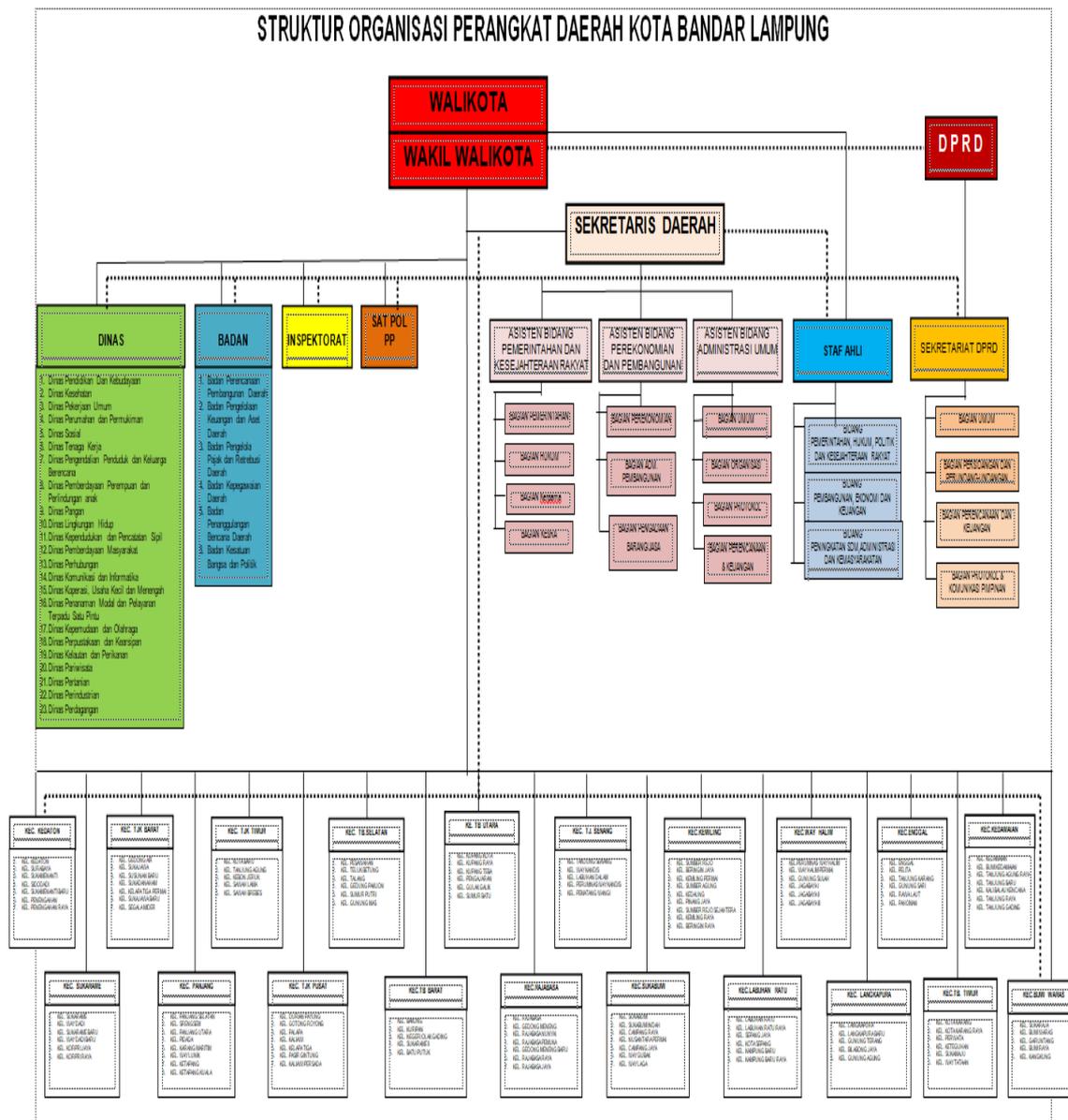
Selain itu, Kecamatan dalam wilayah Kota Bandar Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat, sementara Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah. Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan dan 126 Kelurahan

Selanjutnya dalam rangka mempedomani Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tahun 2021, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung membubarkan Sekretariat Korpri dan mengalihkan urusannya ke dalam salah satu Tupoksi Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung selengkapnya disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 1.2.

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung 2021

1.4. APARATUR PEMERINTAH

Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertugas untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2021 sejumlah 8.303 orang, berikut tabel jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021 :

Tabel 1.10

**JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2021**

NO	GOL / PANGKAT	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	2	3	4
1	I/A (Juru Muda)	1	1
2	I/B (Juru Muda Tk I)	16	10
3	I/C (Juru)	25	15
4	I/D (Juru Tk I)	45	48
	TOTAL GOLONGAN I	87	74
5	II/A (Pengatur Muda)	56	53
6	II/B (Pengatur Muda Tk I)	258	149
7	II/C (Pengatur)	284	247
8	II/D (Pengatur Tk I)	358	389
	TOTAL GOLONGAN II	956	838
9	III/A (Penata Muda)	800	1081
10	III/B (Penata Muda Tk I)	1046	1085
11	III/C (Penata)	1338	1205
12	III/D (Penata Tk I)	1492	1599
	TOTAL GOLONGAN III	4676	4971
13	IV/A (Pembina)	1179	1080
14	IV/B (Pembina Tk I)	1353	1202
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	93	136
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	2	3
17	IV/E (Pembina Utama)	-	-
	TOTAL GOLONGAN IV	2627	2421
	TOTAL PNS	8346	8303

Sumber : BKD Kota Bandar Lampung 2021

Tabel 1.11

**PERBANDINGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 DAN 2021**

TAHUN 2020				TAHUN 2021		
JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH TOTAL	PRIA	WANITA	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
FUNGSIONAL TERTENTU	748	4002	4750	914	4242	5156
FUNGSIONAL UMUM	1196	976	2172	1168	989	2157
STRUKTURAL						
ESELON V	-	-	-	-	-	-
ESELON IV	648	562	1210	426	368	794
ESELON III	116	62	178	103	62	165
ESELON II	31	5	36	27	4	31
ESELON I	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL	2739	5607	8346	2638	5665	8303

Sumber : BKD Kota Bandar Lampung 2021

Tabel 1.12

**JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020 DAN 2021**

TAHUN 2020				TAHUN 2021		
TINGKAT PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH TOTAL	PRIA	WANITA	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
Sampai dengan SD	77	12	89	65	7	72
SLTP	80	5	85	68	3	71
SMA/SMK	708	731	1439	617	567	1184
Diploma I dan II	36	104	40	29	65	94
Diploma III/ SEDERAJAT	111	583	694	97	531	572
Sarjana/Diploma IV/Sederajat	1727	4172	5899	1740	4329	6069
JUMLAH TOTAL	2739	5607	8346	2638	5665	8303

Sumber: BKD Kota Bandar Lampung

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparatur, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan.

1.5. ISU STRATEGIS

Di dalam RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 isu strategis pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 4 (empat) isu strategis yang ditentukan berdasarkan analisa terhadap permasalahan pembangunan nasional dan daerah yaitu :

1. Isu strategis berdasarkan isu pembangunan nasional terdiri dari :

a. Penerapan industri 4.0 dan ekonomi digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

- b. Ketersediaan Energi Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat. Cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak dan gas bumi semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan energi dalam negeri. Suplai energi dari dalam negeri pada tahun 2018 hanya mampu memenuhi sekitar 75 persen dari permintaan energi nasional dan diperkirakan akan terus menurun hingga 28 persen di tahun 2045. Berkurangnya kemampuan produksi energi domestik diperkirakan dapat mempengaruhi keseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi nasional di masa yang akan datang. Guna memenuhi kebutuhan energi nasional, maka pada tahun 2024 porsi energi baru terbarukan harus ditingkatkan hingga menuju 23 persen dari bauran energi nasional. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber energi baru untuk mengantisipasi laju penurunan cadangan sumber daya energi fosil di masa mendatang Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan degradasi daya tampung lingkungan hidup merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan. Diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengatasi tantangan tersebut. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pencapaian target-target pembangunan serta memperhatikan arahan fungsi dan struktur ruang dalam pembangunan kewilayahan.
- c. Sustainable Development Goals / SDG's 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan serta 169 Target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi

kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

17 Tujuan SDGs yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs di Indonesia dikelompokkan ke dalam empat pilar yang dalam pelaksanaan keempat pilar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, yaitu:

- 1) Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5;

- 2) Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17 ;
- 3) Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15;
- 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16.

2. Isu Strategis Berdasarkan RPJPD Kota Bandar Lampung

Beberapa isu strategis Pembangunan Jangka Panjang yang tercantum dalam Dokumen RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
- b. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi;
- c. Belum optimalnya penegakkan supremasi hukum dan peningkatan kesadaran politik;
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- e. Terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana dasar;
- f. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- g. Kota Bandar Lampung rawan bencana alam banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami.

3. Isu Strategis Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung

Beberapa isu strategis berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2041 diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam system perkotaan nasional dan dalam Pusat pemerintahan provinsi, Simpul utama kegiatan ekspor-impor, Pusat perdagangan dan jasa regional, Pusat pendukung jasa pariwisata, Pendidikan tinggi, Simpul utama transportasi skala nasional.

- b. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kota Bandar Lampung merupakan jasa pelayanan pemerintahan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan serta perikanan.
- c. Kota Bandar Lampung dalam hal ini diharapkan dapat memainkan peran dan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa regional. dengan dukungan fasilitas yang ada, tentunya Kota Bandar Lampung juga mampu memainkan peran sebagai simpul koleksi dan distribusi serta outlet produksi regional, sehingga diharapkan mampu berperan sebagai growth centre bagi pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
- d. Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar yang beberapa ‘enterchange’nya ada di Kota Bandar Lampung.
- e. Kebutuhan Air Baku : Berdasarkan kajian kondisi hidrologi, Kota Bandar Lampung termasuk kedalam zona rawan ketersediaan air tanah. Diproyeksikan hingga akhir tahun rencana ketersediaan air tanah tersebut kurang dapat diandalkan untuk memenuhi masyarakat Kota Bandar Lampung.
- f. Kondisi Air Permukaan : Berdasarkan hasil uji kualitas air sungai, Sebagian besar sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung memiliki kualitas yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh pencemaran kegiatan domestik rumah tangga, industri, pasar, rumah sakit, dan lainnya. Sehingga secara eksisting air sungai pun belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- g. Kota Bandar Lampung merupakan Kota yang rawan akan bencana gempa bumi, pergeseran tanah dan Tsunami. Hingga saat ini perkembangan dan pertumbuhan Kota belum cukup memperhatikan zonasi-zonasi kawasan yang merupakan zona rawan bencana tersebut. Sehingga tingkat kerentanan bencana Kota cukup tinggi. Selain itu pemahaman masyarakat dalam mensikapi kondisi alam yang berada di kawasan bencana masih rendah.

- h. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi non pertanian akibat dari keterbatasan lahan dan kebutuhan faktor ekonomi masyarakat. Terutama pada Kecamatan Kemiling, Teluk Betung Barat dan Panjang.
- i. Penggerusan beberapa bukit di Kota Bandar Lampung semakin tidak terkendali. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya ruang terbuka hijau kota, daerah tangkapan air, titik evakuasi bencana, serta menurunnya estetika kota Bandar Lampung.
- j. Munculnya slum area dikawasan bantaran sungai, pesisir pantai, permukiman di bantaran rel kereta api, permukiman di SUTET dan permukiman di lereng bukit. Hal ini disebabkan akibat dari keterbatasan lahan dan kebutuhan faktor ekonomi masyarakat.
- k. Secara eksisting supply energi listrik bagi untuk Kota Bandar Lampung berasal dari dua pembangkit listrik yang dimiliki PLN, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Teluk Betung dengan kapasitas 18,18 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tarahan dengan kapasitas total 21,35 MW serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tarahan dengan total kapasitas 48,54 MW. Berdasarkan hasil proyeksi Kota Bandar Lampung diprediksi kebutuhan listriknya meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kebutuhan akan listrik terlihat dari data jumlah KWH yang terus meningkat. Sehingga supply energi listrik yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kota Bandar Lampung.
- l. Secara eksisting kondisi drainase di Kota Bandar Lampung masih perlu diperhatikan karena ada beberapa saluran drainase yang mengalami kerusakan akibat dari penimbunan lumpur, sampah dan tidak terawatnya saluran yang ada sehingga mengakibatkan banjir pada musim hujan.
- m. Masih tercampurnya fungsi saluran drainase sebagai saluran air hujan dengan pembuangan air limbah dapur dan cuci/grey water. Sementara jika dilihat secara fungsional karakteristik sistem drainase berbeda dengan sistem air limbah hal ini tentunya akan membawa masalah pada daerah hulu aliran.

- n. Secara eksisting panjang ruas jalan di Kota Bandar Lampung saat ini belum memenuhi standar yang ada. Jaringan jalan yang ada juga belum terstruktur dengan baik.
- o. Terjadinya titik kemacetan di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan yang cukup tinggi, perlintasan kereta api barang, serta beberapa hal lainnya.
- p. Terminal yang ada secara kuantitas kurang melayani pergerakan Kota dan kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung, sehingga perlu adanya penambahan terminal. Peningkatan kualitas pelayanan terminal yg ada.

4. Isu Strategis Berdasarkan Analisis Permasalahan Kota Bandar Lampung

- a. Penanganan Pandemi Covid-19 Beserta Dampak Sosial dan Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19 yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan – China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19.

Sejak Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020, banyak kebijakan dan strategi dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan kematian signifikan akibat penyakit ini. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi force majeure yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh stakeholder diantaranya adalah Pemerintah Daerah (Pemda).

Pandemi Corona Virus Disease 19 atau Covid-19 yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, sehingga kedepan seluruh stakeholder dan Pemerintah Daerah masih perlu merespon dengan cepat penanganan

pandemi ini termasuk juga penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari adanya Covid-19.

Menyusun perencanaan di tengah suasana yang tidak pasti tentu saja dibutuhkan langkah strategis untuk dapat menangani wabah Covid-19 tersebut. Kita berharap tentunya krisis Covid-19 ini segera berakhir, namun kita juga harus bersiap-siap jika skenario masih berlanjut. Jika pada Tahun 2020 krisis ini selesai, maka di beberapa tahun kedepan kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi dan pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Namun disamping itu Pemerintah Daerah juga harus bersiap diri jika pandemi ini masih terus berlanjut dan obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan agar Pemerintah Daerah dapat melindungi setiap nyawa warganya.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembangunan. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta tingkat kesejahteraan yang lebih baik biasanya adalah negara-negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas SDM merupakan salah satu faktor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM maka masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan Kesehatan harus diatasi.

Kondisi pendidikan di Kota Bandar Lampung secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat.

Beberapa isu strategis dan kursorial dalam bidang Pendidikan yang masih sangat relevan hingga saat ini adalah; (i) Mutu atau kualitas pendidikan, (ii) Penguatan Sumber Daya Manusia-SDM, (iii) Perluasan akses pendidikan, dan (iv) Menghadirkan tatakelola pendidikan dalam bentuk Integrated System berbasis Teknologi Informasi.

Dalam menghadapi tantangan ke depan dengan adanya globalisasi maka perlu memperhatikan akses pendidikan berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Oleh karena itu, Peningkatan Kualitas Pendidikan bagi semua kalangan, yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana Pendidikan termasuk perpustakaan dan laboratorium, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan Pendidikan masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan. Disamping itu treatment terhadap sekolah dan madrasah dalam berbagai hal harus diberlakukan sama.

Kualitas SDM perempuan dan generasi muda juga tidak kalah penting dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, untuk itu pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan peningkatan SDM generasi muda juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian.

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan salah satu isu penting. Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Derajat kesehatan masyarakat masih menjadi persoalan di Kota Bandar Lampung dan membutuhkan penanganan yang komprehensif khususnya bagi masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus. Kasus kematian ibu, bayi dan balita serta kasus gizi buruk masih terjadi dan memerlukan penanganan. Angka kematian bayi bagi masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dari masyarakat tidak miskin.

Penduduk Miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan seluruhnya harus menjadi tanggungjawab pemerintah, meskipun demikian dalam implementasinya masih ada penduduk miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dikarenakan berbagai sebab, antara lain data base yang digunakan masih ada perbedaan persepsi, dan juga mekanisme pelayanan rujukan dan klaim yang belum sesuai. Selain itu fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan bagi peyandang cacat dan lansia belum memadai.

Pelayanan kesehatan bukan hanya proses pengobatan yang diberikan kepada masyarakat saat berada di Puskesmas atau rumah sakit, namun jauh sebelum itu yakni bagaimana cara pencegahan penyakit dan menerapkan pola hidup sehat bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dirasa masih kurang.

Selaras dengan isu strategis pembangunan kesehatan yang menjadi arahan Presiden, maka penurunan Angka Stunting, Angka Kematian Ibu dan Bayi, perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan, Penguatan Pelayanan Kesehatan serta isu terkait obat dan alat kesehatan menjadi isu pembangunan Kesehatan Kota Bandar Lampung yang memerlukan penanganan kedepan.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung dengan mengedepankan upaya promotif, preventif, kuratif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus menjadi perhatian Pemerintah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

c. Masalah Transportasi dan Kemacetan

Sebagai ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menghadapi permasalahan transportasi yang kompleks akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial. Kondisi sistem transportasi Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun semakin mengalami perubahan ke arah yang mengkhawatirkan. Munculnya persoalan-persoalan transportasi seperti kemacetan lalulintas, masalah perparkiran, angkutan umum dan sebagainya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan transportasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan moda transportasi dan penyediaan utilitas dan infrastruktur yang memadai.

Permasalahan transportasi di Kota Bandar Lampung secara teknis disebabkan antara lain kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan khususnya kendaraan pribadi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda. Permasalahan yang paling mendasar adalah menyangkut kapasitas jalan yang sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota Bandar Lampung. Penambahan ruas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan. Hampir semua ruas jalan arteri di Kota Bandar Lampung sudah mengalami kemacetan terutama pada jam-jam tertentu.

Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Pertambahan kendaraan bermotor terus meningkat setiap waktu. Memang beberapa tahun terakhir telah dilakukan penambahan armada Bus Rapid Transit (BRT), namun pengadaan bus tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sedangkan untuk angkutan kota (angkot) yang merupakan moda transportasi yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi feeder ke kawasan pemukiman, peremajaan dan revitalisasinya masih belum optimal.

Faktor lain yang menyebabkan kemacetan adalah rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidaksiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalu lintas. Rendahnya tingkat kedisiplinan salah satunya juga didorong oleh minimnya pelibatan masyarakat secara luas dalam perencanaan program transportasi.

d. Penanggulangan Banjir, Rob dan Genangan

Banjir merupakan masalah yang berulang setiap tahun di Kota Bandar Lampung yang bisa terjadi hingga lima kali dalam setahun. Rentannya Kota Bandar Lampung terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari

demografi Kota Bandar Lampung serta aliran 2 sungai besar dan 23 sungai-sungai kecil di dalam wilayahnya. Disamping itu adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi di wilayah Kota Bandar Lampung serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di Kota Bandar Lampung sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan (stake holder) terkait pengelolaan skema pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

Selain banjir, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga perlu mengantisipasi fenomena banjir rob yang disebabkan oleh pasang surut air laut maupun penurunan muka tanah pada beberapa kawasan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pembangunan tanggul laut dan tanggul muara sungai.

e. Kawasan kumuh, Permukiman Liar dan Rumah Tidak Layak Huni.

Urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang cepat berkontribusi pada munculnya permukiman informal di Kota Bandar Lampung. Sebagai pusat kegiatan di Provinsi Lampung, sekitar 12.4% populasi Provinsi berada di Bandar Lampung. Bandar Lampung melayani berbagai area di sekitarnya, baik dalam hal pemerintahan, perdagangan, layanan keuangan, pendidikan dan lain sebagainya. Perannya sebagai pusat pertumbuhan didukung oleh rencana untuk meningkatkan aksesibilitas ke dan dari Kota Bandar Lampung.

Ada tujuh indikator area kumuh yaitu 1) kumuh dalam hal bangunan, 2) jalan lingkungan, 3) pasokan air minum, 4) drainase dan lingkungan, 5) pengelolaan air limbah, 6) pengelolaan limbah padat, dan 7) perlindungan dari kebakaran. KOTAKU Bandar Lampung mencatat bahwa terdapat 18 kelurahan di kota yang masuk dalam kategori area kumuh terutama permukimannya. Kelurahan-kelurahan ini adalah: Bumi Kedamaian, Way Gubak, Way Laga, Ketapang, Campang Raya, Kangkung, Sawah Berebes, Rajabasa Nunyai, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Way Dadi Baru, Kaliawi Persada, Pasir Gintung, Kebon Jeruk, Pesawahan, Kaliawi, Kelapa Tiga, dan Gulak Galik. Pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan pelaksanaan program termasuk satu data, satu peta dan satu dokumen perencanaan untuk semua yang berkaitan dengan area kumuh. Saat masa pelaksanaan, sinkronisasi dan harmonisasi antara aktor/sektor, sumber pendanaan, infrastruktur yang harus memenuhi standar harus dipertimbangkan dalam menangani kawasan kumuh dan permukiman informal.

f. Masalah Penataan Ruang

Upaya penataan ruang kota seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan penggunaan lahan yang efektif sehingga menimbulkan kesemrawutan kota, yang terwujud dalam penggunaan tempat-tempat umum bagi kegiatan PKL, seperti trotoar/pinggir jalan, taman, terminal/stasiun ataupun kolong jembatan. Keterbatasan wahana atau tempat untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan sosial budaya, seperti untuk berinteraksi dan mengejawantahkan aspirasi-aspirasi sosial budayanya ataupun keterbatasan sarana rekreasi yang murah menyebabkan penduduk kota menggunakan jalan atau gang sempit sebagai tempat bermain sepakbola. Permukiman kumuh tumbuh di berbagai sudut kota, khususnya di sempadan sungai, jalur kereta api dan di lahan-lahan kosong. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Bandar Lampung akan menyebabkan kampung-kampung kota semakin sesak, tidak sehat dan rawan kriminalitas.

g. Peningkatan Ekonomi Daerah dan Perluasan Kesempatan Kerja

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakatnya. Masalah ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung ditandai oleh beberapa ketidakseimbangan yang dasar. Pertama adalah ketidak-seimbangan secara umum antara penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan lapangan kerja. Jumlah yang dibutuhkan melebihi jumlah yang dapat disediakan. Kedua adalah kekurangseimbangan antara kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dengan penyediaan tenaga terdidik. Ketiga adalah adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus merumuskan solusi terbaik untuk meningkatkan perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di Kota Bandar Lampung. Mulai dari membuat regulasi dan kebijakan serta menjaga sinergi antara pemerintah daerah dengan pengusaha; pengembangan sektor-sektor ekonomi seperti Jasa, konstruksi, Pariwisata, industri dan UMKM yang diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penyerapan sumberdaya daerah serta meningkatkan ekspor produk dan jasa yang dihasilkan; hingga pemberian bantuan bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembuatan sarana penunjang maupun pemberian bantuan finansial.

Termasuk kesiapan daerah dalam memasuki Era industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi otomatisasi tinggi yang ditopang infrastruktur berbasis internet dan ekonomi digital, akan ada banyak peran yang tergantikan dalam disrupsi besar tersebut. Manusia yang tidak terampil dan peka terhadap perubahan menganggap itu semua sebagai ancaman dan mimpi buruk, karena pekerjaan dengan kemampuan sangat mudah akan diambil alih oleh mesin. Oleh karena itu, kesiapan daerah untuk memasuki era industri 4.0 yang akan mempengaruhi kinerja sektorsektor strategis daerah menjadi isu yang sangat penting dan perlu untuk direspon.

h. Masalah Kemiskinan dan PMKS

Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama dan menjadi isu pembangunan Kota Bandar Lampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung selama tahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tingginya angka kemiskinan dibanding wilayah lainnya yg sudah baik mengisyaratkan pada kita bahwa Bandar Lampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Berdasarkan data BPS Tahun 2020, dari 1.166.066 jiwa penduduk Kota Bandar Lampung sekitar 8,81 persen atau sebesar 93.740 jiwa penduduk Kota Bandar Lampung masih berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan secara umum dilihat atas dasar pemenuhan kebutuhan atau materi yang dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi suatu rumah tangga dengan jumlah minimum kebutuhan hidup. Akan tetapi saat ini kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, persoalan munculnya jutaan anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan sosial, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan sangat terbatas.

Oleh karena itu, kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung yang pro kemiskinan yang dapat memberikan aktifitas-aktifitas secara langsung untuk pengentasan kemiskinan disegala bidang/sector perlu untuk terus diperhatikan, termasuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

i. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kota Bandar Lampung. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan.

Isu dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu isu terkait kondusivitas dan stabilitas daerah, dengan masalah pokok yaitu merujuk pada isu mengenai derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis serta mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat.

Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk yang cukup besar sehingga masalah Ketertiban dan ketentraman serta Keindahan (K3) menjadi lebih kompleks. Selain itu keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan Partai Politik yang ada di lingkungan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang optimal, masih banyak organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Kondisi ketentraman, ketertiban umum dipengaruhi oleh kenaikan jumlah demo yang terjadi dan dapat menyebabkan potensi konflik sosial. Kejadian kriminalitas maupun demo tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbandung, menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan perhatian lebih untuk menjamin Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

j. Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak 2010 dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ini lalu dibuatkan Road Map Reformasi Birokrasi yang terbagi dalam beberapa fase dimana Tahun 2020 Reformasi Birokrasi akan masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai GDRB 2010-2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi Reformasi Birokrasi 'terwujudnya pemerintahan kelas dunia'.

Selanjutnya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 secara operasional diturunkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam rangka menjalankan program Reformasi Birokrasi pada kedua fase yang sudah berjalan, ditetapkanlah delapan area perubahan, yaitu mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangan, dan pelayanan publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan, dimana hal ini dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya

kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik, termasuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dipandang sebagai konsekwensi logis dari serangkaian perubahan-perubahan yang sudah dilakukan terkait reformasi birokrasi.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari high cost economy diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

k. Pengembangan dan Penguatan Inovasi Daerah

Pengembangan dan Penguatan Inovasi Daerah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sering kali dikaitkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah telah berhasil meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonominya dengan signifikan melalui penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas iptek. Namun, pengembangan Iptek saja tidak cukup, karena perlu diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik yang mencakup kultur, budaya, serta pembangunan manusia dan wilayah. Selain itu perlu disesuaikan pula pelaksanaan penelitian dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan penelitian dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keunggulan komparatif Kota Bandar Lampung menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan wilayah dan masyarakat menjadi basis penting dalam keberlanjutan pembangunan.

I. Masalah Lingkungan Hidup

Masalah yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan pada akhirnya kualitas hidup masyarakat kota meliputi aspek fisik seperti kualitas udara, air dan tanah masih menjadi perhatian yang membutuhkan penanganan kedepan. Polusi udara buruk karena BBM yang masih mengandung timbal dan asap kendaraan yang tidak tersaring baik, polusi suara juga semakin terasa karena bunyi mesin kendaraan umum yang melebihi ambang toleransi. Sementara itu air tanah yang menjadi sumber bagi sebagian penduduk kota kualitasnya terganggu karena tercemar limbah rumah tangga dan industri. Masalah persampahan, masalah sanitasi kota, serta kualitas air yang kurang baik masih menjadi momok bagi Kota Bandar Lampung. Masih banyak warga yang secara sadar membuang sampah dan limbah ke sungai sehingga mengundang adanya bencana seperti banjir dan rusaknya ekosistem sungai akibat tercemar oleh zat-zat kimia yang beracun.

Produksi limbah di Kota Bandar Lampung cenderung meningkat setiap tahunnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa produksi limbah yang masuk ke TPA Bakung pada tahun 2019 mencapai 1.000 ton/hari, sehingga dapat diperkirakan volume limbah pada tahun 2019 adalah sekitar 365.000 ton. Dengan mempertimbangkan angka ini, TPA Bakung memiliki potensi besar untuk menghasilkan gas rumah kaca (GRK). Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menyatakan bahwa TPA Bakung menghasilkan 788.404 m³ gas metana pada tahun 2018. Dari perhitungan potensi gas metana setiap tahunnya di TPA ternyata cukup besar dan jumlah ini terus meningkat pada setiap tahunnya. Peningkatan paling signifikan diperkirakan terjadi pada tahun 2019 yang mana terdapat peningkatan 567.397 m³ volume gas metana dari tahun sebelumnya.

Pengelolaan limbah di daerah pesisir Kota Bandar Lampung cukup mengkhawatirkan. Garis pesisir telah diperluas ke arah laut karena masyarakat setempat menggunakan limbah rumah tangga sebagai bahan baku tempat pembuangan akhir di sepanjang garis pantai. Praktik 'reklamasi sampah' ini terus terjadi sampai saat ini.

Polusi air laut di Teluk Lampung karena limbah diduga telah membunuh habitat dan ekosistem laut. Hasil tangkapan ikan oleh nelayan juga semakin menurun, dan banyak sampah plastik yang tersangkut pada jaring nelayan. Data Dinas Lingkungan Provinsi Lampung pada tahun 2019 menyebutkan bahwa 80 persen sampah di pesisir pantai Bandar Lampung datang dari darat. Tidak hanya dari masyarakat pesisir, limbah ini dari Koala, Way Lunik, dan Kuripan. Limbah ini menumpuk di Teluk Lampung tidak hanya dari hulu Bandar Lampung tapi juga dari luar kawasan Bandar Lampung.

Kondisi lingkungan perumahan seperti kekumuhan, kepadatan yang tinggi, lokasi yang tidak memadai serta kualitas dan keselamatan bangunannya mengakibatkan menurunnya kualitas permukiman yang disertai dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan menipisnya sumber daya alam. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan clean land, clean water dan clean air di Kota Bandar Lampung perlu terus dilakukan karena kualitas lingkungan yang buruk akan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, berkurangnya ruang terbuka hijau, dampak perubahan iklim serta upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama.

m. Bencana Alam

Kota Bandar Lampung secara topografis dan geografis adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana. Saat ini wilayah Kota Bandar Lampung memiliki beberapa kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir. Berdasarkan data BNPB, Indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2020 menunjukkan angka 182 dengan kategori Tinggi.

Dalam menghadapi ancaman bencana perlu dilakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural. Salah satu upaya mitigasi non struktural adalah dengan regulasi dan kegiatan peningkatkan kapasitas masyarakat dengan pembentukan Kelurahan siaga bencana. Upaya mitigasi struktural adalah dengan pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana. Namun demikian kelurahan siaga bencana yang telah terbentuk belum seluruhnya memenuhi kriteria utama, hal ini mengakibatkan kejadian bencana masih menimbulkan resiko yang tinggi. Selain itu adaptasi terhadap perubahan iklim di masyarakat juga perlu untuk disosialisasikan.



BAB 2 PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan strategis Kota Bandar Lampung untuk periode lima tahun. Segala hal yang terkait seperti penjabaran visi, misi, serta program Pemerintah Kota Bandar Lampung tertuang di dalamnya. Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga turut menjadi bahan pertimbangan.

A. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu :

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT,
CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA,
NYAMAN, UNGGUL BERDAYA
SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK
KEMAKMURAN RAKYAT”**

BANDAR LAMPUNG : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT : Kota Bandar Lampung sebagai Kota yang bersih,nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA : Kondisi Kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

NYAMAN : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat

UNGGUL : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

BERDAYA SAING : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT: Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah.

Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

- MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.
- MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang
- MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
- MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

- MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi
- MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pada Penyusunan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 terdapat indikator sehingga tingkat keberhasilannya dapat diukur, pada RPJMD ini disertakan indikator untuk setiap tujuan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dan menetapkan sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2. Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat 1.1.3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1. Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan 3.1.2. Meningkatnya pengendalian banjir 3.1.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak 3.1.4. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang 3.1.5. Menurunnya masalah kemacetan
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui kerakyatan	4.1.1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah 4.1.2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja 4.1.3. Menurunnya kemiskinan 4.1.4. Meningkatnya penanganan PMKS
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religious	5.1. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama 5.1.2. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatnya Penerapan
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovati	6.1.1. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung 6.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 6.1.3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

1	2	3	4
			6.1.4. Terciptanya Inovasi Layanan Publik
			6.1.5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	7.1. Terwujudnya keseimbangan lingkungan pembangunan berkelanjutan dan	7.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 7.1.2. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

Sumber: RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026

2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD Kota Bandar Lampung harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi Kepala Daerah, serta strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis Kepala Daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun periode 2021-2026 adalah untuk menjawab isu strategis, visi misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan fokus dan kebijakan tahunan pembangunan yang akan memberi arah yang jelas bagi Kota Bandar Lampung dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD setiap tahun. Kebijakan tersebut adalah kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2021. RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2021.

Dalam merumuskan fokus dan kebijakan tahunan daerah pada periode pembangunan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan kondisi pandemi yang sedang dialami sampai saat ini. Sejak Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 2 Maret 2020, banyak strategi dan kebijakan dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan kematian signifikan akibat penyakit ini. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi *force majeure* yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh stakeholder diantaranya adalah Pemerintah Daerah. Wabah Corona memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan, tak terkecuali Indonesia. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi pandemi Covid-19. Sementara kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat Covid-19 dinyatakan berakhir.

Kondisi pandemi ini tentu saja menyulitkan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sepenuhnya kegiatan masyarakat, sementara roda perekonomian harus tetap berjalan. Hal tersebut mengedukasi masyarakat untuk memasuki kehidupan normal baru (*new normal*) serta membiasakan hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan tetap patuh dan disiplin dengan Protokol kesehatan. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan Pandemi Covid-19 beserta dampaknya yang telah dan masih akan dilakukan yaitu :

1. Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, melalui :
 - a. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta penguatan infrastruktur kesehatan, tenaga medis dan laboratorium;
 - b. Terus mensosialisasikan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas) dan 3 T (testing, tracing, dan treatment);
 - c. Meningkatkan fungsi dan koordinasi Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung sampai ke tingkat kelurahan;
 - d. Melaksanakan vaksinasi Covid-19 termasuk memantau pelaksanaannya di masyarakat.
2. Pemulihan ekonomi masyarakat dengan mengaktifkan kembali roda perekonomian secara berangsur melalui :
 - a. Mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dengan memberikan akses permodalan tanpa bunga;
 - b. Memperkuat ketahanan pangan daerah;
 - c. Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja dan masyarakat agar lebih terampil dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri.
3. Jaringan pengaman sosial masyarakat, melalui perluasan program bantuan sosial dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial, termasuk perluasan basis data.

Pandemi Covid-19 masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, sehingga kedepan seluruh stakeholder dan Pemerintah Daerah masih perlu merespon dengan cepat penanganan pandemi ini termasuk juga penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari adanya Covid-19.

Kita berharap tentunya krisis Covid-19 ini segera berakhir, namun kita juga harus bersiap-siap jika skenario masih berlanjut. Jika pada Tahun 2021 krisis ini selesai, maka di tahun-tahun selanjutnya kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi dan pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Ada dua agenda penting dalam Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021-2026, yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Merujuk pada strategi dan arah kebijakan Tahun 2021-2026, berikut prioritas/fokus pembangunan dan arah kebijakan tahunan daerah:

Tabel 2.2
PRIORITAS/FOKUS DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Tahun 2021 Tahun (0)	Tahun 2022 Tahun (1)	Tahun 2023 Tahun (2)	Tahun 2024 Tahun (3)	Tahun 2025 Tahun (4)	Tahun 2026 Tahun (5)
Penanganan pandemi Covid-19 melalui pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana Kesehatan serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat	Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Sektor-sektor Strategis untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan	Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi daerah melalui pembangunan disegala bidang	Memacu Pembangunan infrastruktur dan SDM yang berdaya saing untuk Meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan serta mengurangi kesenjangan	Menguatkan Pembangunan Manusia, Kemandirian Ekonomi dan infrastruktur perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Memperkokoh perekonomian daerah yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Sumber: RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026

Dilihat dari tabel diatas, maka yang menjadi prioritas/fokus pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 adalah penanganan pandemi Covid-19 melalui pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran akan tercapai ketika strategi yang digunakan tepat. Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibenahi.

Adapun strategi Pemerintah kota Bandar Lampung mencakup penentuan kebijakan, program, serta kegiatan. Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

Kebijakan: pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program : adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan : adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terutama, indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.3
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.1	Angka Harapan Hidup (AHH)
		1.2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)
		1.3	Laju pertumbuhan penduduk
2.	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
		2.2	Angka Harapan Lama Sekolah
3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.1	Indeks Pembangunan Gender
		3.2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak
		3.3	Pemuda Berprestasi
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	4.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap
5.	Meningkatnya pengendalian banjir	5.1	Persentase Daerah Rawan Banjir
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	6.1	RTLH yang tertangani pertahun
		6.2	Persentase Kawasan Kumuh
7.	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW
8.	Menurunnya masalah kemacetan	8.1	Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan
9.	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	9.1	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB
		9.2	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB
		9.3	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB
		9.4	Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya
		9.5	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
10	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	10.1	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)
		10.2	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)
		10.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
11	Menurunnya kemiskinan	11.1	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
		11.2	Pendapatan Per Kapita Penduduk
12	Meningkatnya penanganan PMKS	12.1	Persentase PMKS yang tertangani
13	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	13.1	Angka kriminalitas yang tertangani
		13.2	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani

1	2	3	4
14	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	14.1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
15	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
17	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	21.1	Indeks Resiko Bencana

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan sistem manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekadar tandatangan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.1. Angka Harapan Hidup	71,72	Tahun
				1.2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,60	Persen
				1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	Persen
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		2. Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,945	Tahun
				2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	15,37	Tahun
			3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.1. Indeks Pembangunan Gender	93,87	Angka
				3.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Tingkat Capaian
				3.3. Pemuda Berprestasi	2,92	Persen
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,31	Persen
			5. Meningkatnya pengendalian banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0	Persen
			6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	6.1. RTLH yang tertangani pertahun	32,68	Persen
				6.2. Persentase Kawasan Kumuh	1,167	Persen
			7. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,14	Persen

1	2	3	4	5	6	7
			8. Menurunnya masalah kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	40	Persen
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	9. Meningkatnya Sektor unggulan daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,0	Persen
				9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	13,65	Persen
				9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,33	Persen
				9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	26,30	Persen
				9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	16,96	Persen
				10. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,49
			10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)		4,55	Persen
			10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		8,78	Persen
			11. Menurunnya kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,29	Persen
				11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	51-53	Juta Rp
			12. Meningkatkan penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	74,00	Persen
			5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religious	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	13. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,00	Persen				
14. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	14.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	25,00				Persen

1	2	3	4	5	6	7
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	15. Meningkatkan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	60,05	Skor
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	16. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	16.1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	60,64	Angka
			17. Meningkatkan Pengendalian Resiko Bencana	17.1. Indeks Resiko Bencana	145,932	Angka

Sumber: RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026

2.5. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Selama tahun 2021 pelaksanaan program berupa 136 program dan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Bandar Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung yaitu APBD murni sebesar Rp.2,409,649,186,646.79 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.2,080,815,352,927.14, dan Belanja Modal sebesar Rp.298,833,833,719.65 serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.30.000.000.000,00, kemudian setelah dilakukan perubahan maka total APBD Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp.2.849.790.114.635,84 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 1.593.087.342.619,21 dan Belanja Modal sebesar Rp.733.724.213.922,15 serta belanja tidak terduga sebesar 30.000.000.000,00, komposisi belanja APBD Kota Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5**RENCANA BELANJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	BELANJA APBD MURNI (Rp)	%	BELANJA APBD PERUBAHAN (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.080.815.352.927,14	86,3	2.086.065.900.713,69	73,2
2	Belanja Modal	298.833.833.719,65	12,4	733.724.213.922,15	25,7
3	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	1,24	30.000.000.000,00	1,05
JUMLAH		2.409.649.186.646,79		2.849.790.114.635,84	

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2021



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR UTAMA

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi Target} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1.

SKALA YANG DIGUNAKAN BILAMANA INDIKATOR SASARAN MEMPUNYAI MAKNA PROGRESS POSITIF

NO	RATA-RATA CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	≥100	SANGAT BAIK
2	85-99	BAIK
3	70-85	CUKUP
4	55-70	KURANG BAIK
5	<50	BURUK

Tabel 3.2.**SKALA YANG DIGUNAKAN BILAMANA INDIKATOR SASARAN
MEMPUNYAI MAKNA PROGRESS NEGATIF**

NO	RATA-RATA % CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	≥100	BURUK
2	85-99	KURANG BAIK
3	70-85	CUKUP
4	55-70	BAIK
5	<50	SANGAT BAIK

Keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat dari capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2021 dapat diukur dengan melihat realisasi dari target indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 berikut :

Tabel 3.3.**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2021			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.1. Angka Harapan Hidup	71,72	71,42	99,58	Baik
		1.2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,60	6,65	99,24	Baik
		1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	0,8%	138,6	Sangat Baik
2	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,945	10,97	99,77	Baik
		2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	15,37	14,70	95,64	Baik
3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.2. Indeks Pembangunan Gender	93,87	93,86	99,98	Baik
		3.3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	100	Sangat Baik
		3.4. Pemuda Berprestasi	2,92	2,92%	100	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,31%	85,60%	111,29	Sangat Baik
5	Meningkatnya pengendalian banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0%	54,08%	98,33	Baik

1	2	3	4	5	6	7
6	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	6.1. RTLH yang tertangani pertahun	32,68	31,20	95,47	Baik
		6.2. Persentase Kawasan Kumuh	1,17%	1,31%	88,03	Baik
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,14%	54,26%	100,2	Sangat Baik
8	Menurunnya masalah kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	40%	40%	100	Sangat Baik
9	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,10%	20,97%	99,85	Baik
		9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	13,65%	13,80%	101,1	Sangat Baik
		9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,33%	15,16%	98,89	Baik
		9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	26,30%	22,64%	86,08	Baik
		9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	16,96%	16,09%	94,87	Baik
10	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,49	57,45	370	Sangat Baik
		10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	4,55	12	263	Sangat baik
		10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,78%	8,85%	99,77	Baik
11	Menurunnya kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,29%	90,89%	99,5	Baik
		11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	51-53 Juta	51,91 Juta	100	Sangat Baik
12	Meningkatnya penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	74,00%	63,06%	85,21	Baik
13	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Umat Beragama	13.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.411	1.630	115,52	Sangat Baik
		13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,00%	78%	100	Sangat Baik
14	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	14.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	25,00%	25,00%	100	Sangat Baik
15	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	60,05	Data belum tersedia dari pusat	Data belum tersedia dari pusat	-

1	2	3	4	5	6	7
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	60,64	63,75	105,1	Sangat Baik
17	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	21.1 Indeks Resiko Bencana	145,932	Data belum tersedia dr BNPB	Data belum tersedia dr BNPB	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung dari masing-masing Misi adalah sebagai berikut :



MISI 4

Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB mencapai **99,85%**
2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB mencapai **101,1%**
3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB mencapai **98,89%**
4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya mencapai **86,08%**
5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat mencapai **94,87%**
6. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN) mencapai **370%**
7. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA) mencapai **263%**
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai **99,77%**
9. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan mencapai **99,5%**.
10. Pendapatan Per Kapita Penduduk mencapai **100%**
11. Persentase PMKS yang tertangani mencapai **85,21%**

MISI 5

Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius Kerakvatan

1. Angka kriminalitas yang tertangani mencapai **115,52%**
2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani mencapai **100%**
3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan mencapai **100%**

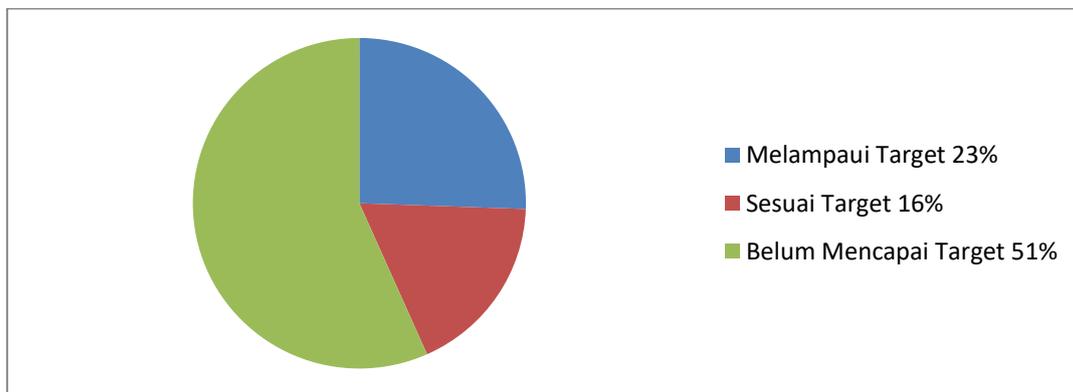
MISI 6

Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi

1. Indeks RB data belum tersedia dari pusat (Kementerian PAN RB)



GRAFIK 3.1.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021



Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2021

Hasil dari capaian di atas turut didukung program prioritas daerah di Kota Bandar Lampung. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung Tahun 2021, telah ditetapkan 17 (tujuh belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja utama (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Sebanyak 3 indikator
SASARAN 2	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Sebanyak 3 indikator
SASARAN 4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 5	Meningkatnya pengendalian banjir	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 6	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 8	Menurunnya masalah kemacetan	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 9	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Sebanyak 5 indikator
SASARAN 10	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Sebanyak 3 indikator
SASARAN 11	Menurunnya kemiskinan	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 12	Meningkatnya penanganan PMKS	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 13	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 14	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 15	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 17	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Sebanyak 1 indikator

Secara umum Pemerintah Kota Bandar Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.4**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

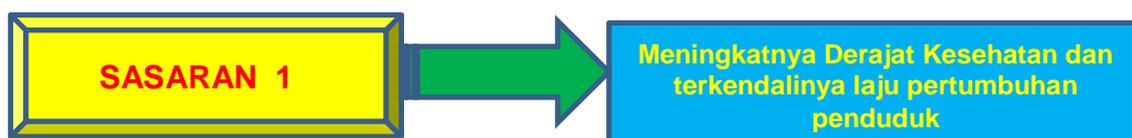
NO	PREDIKAT	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	SANGAT BAIK	≥100	12
2	BAIK	85-99	16
3	CUKUP	70-85	1
4	KURANG BAIK	55-70	–
5	BURUK	<50	–
6	BELUM ADA DATA		2
JUMLAH			31

Tabel 3.5**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN	0-49,9	50-70	71-85	86-100	>100
				Buruk	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI 1								
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	3	112,5%					Sangat baik
MISI 2								
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2	98%				Baik	
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3	99,99%				Baik	
MISI 3								
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	1	111,29%					Sangat baik
2	Meningkatnya pengendalian banjir	1	98,33%				Baik	
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	2	92%				Baik	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1	100,2%					Sangat baik
5	Menurunnya masalah kemacetan	1	100%				Baik	

MISI 4								
1	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	5	96,2%				Baik	
2	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	3	244,26%					Sangat baik
3	Menurunnya kemiskinan	2	99,75%				Baik	
4	Meningkatnya penanganan PMKS	1	85,21%			Cukup		
MISI 5								
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	2	107,76%					Sangat Baik
2	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatnya Penerapan	1	100%				Baik	
MISI 6								
1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	Belum Ada Data					
MISI 7								
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	105%					Sangat Baik
2	Meningkatnya Pengendalian Bencana Resiko	1	Belum Ada Data					

3.3. ANALISIS PENCAPAIAN PER SASARAN STRATEGIS



Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk” memiliki 3 indikator kinerja utama, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

1. ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup ini merupakan produk perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, untuk Kota Bandar Lampung angka harapan hidup tahun 2021 mempunyai target sebesar **71,72%**. Realisasi capaian targetnya yaitu **71,42%** dengan capaian kinerja yang baik sebesar **99,58%**. Persentase capaian sedikit menurun dari tahun sebelumnya dengan capaian **100,52%**. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak hanya ingin mencapai angka harapan hidup yang tinggi saja namun sebaiknya dibarengi dengan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik, sehingga dalam usia yang mencapai 70 tahunan masih dalam kondisi yang sehat dan mandiri menjalankan aktifitas meskipun secara produktifitas sudah menurun.

Adapun tabel peningkatan Angka Harapan Hidup dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Peningkatan Angka Harapan Hidup

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup Penduduk (Tahun)	70.84	71.01	71.28	71,37	71,42

Pada lima tahun terakhir sejak tahun 2016-2021 terdapat peningkatan Angka Harapan Hidup rata-rata sebesar **0,52%** dengan angka Rata-rata **71,2%** selama tahun **2017-2021**.

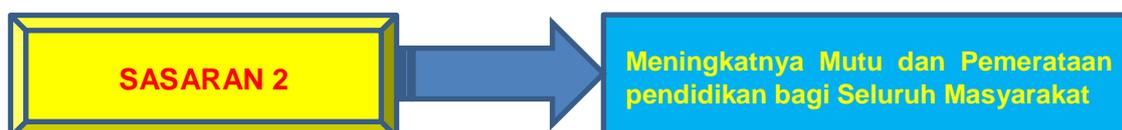
2. PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK BADUTA (BAWAH DUA TAHUN) (PERSEN) BALITA

Stunting merupakan kondisi dimana tubuh anak pendek atau sangat pendek. Banyak penyebab stunting ini, salah satunya adalah kondisi anak, khususnya anak yang berumur di bawah dua tahun (baduta) kurang gizi saat dalam kandungan ibunya. Berdasarkan data diperoleh hasil jumlah kasus stunting anak yang berumur di bawah dua tahun di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2021 sebesar **6,65%** (hasil penimbangan) atau sebanyak 924 bayi umur

dibawah dua tahun. Meski angka ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar **6,60%** namun keadaan ini sudah menjadi baik dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,24%. Namun kedepan perlu mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan cara melakukan berbagai upaya yang diselaraskan dengan target standar pelayanan minimal bidang kesehatan dalam upaya menurunkan kasus stunting ini di Kota Bandar Lampung. Seperti kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan menurunkan angka kematian ibu dan balita serta perbaikan gizi masyarakat. Upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita dan perbaikan bagi anak gizi kurang sehingga kasus stunting ini lambat laun dapat terus dikurangi.

3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Untuk mengetahui Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandar Lampung menggunakan laju pertumbuhan penduduk geometrik yang menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Data Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung secara resmi dikeluarkan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandar Lampung sebesar **0,8%** dari target 2021 sebesar **1,109%** dengan capaian kinerja sangat baik yaitu sebesar **138,6%**. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya LPP tersebut adalah tingkat kelahiran. Dampak dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tersebut mempengaruhi penyediaan sarana dan prasarana di berbagai bidang, karenanya perlu adanya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana.



Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat” memiliki 2 indikator kinerja utama, yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

1. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Kegunaan : RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka Rata-rata Lama Sekolah dengan persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2021 adalah **99,77%**. Pengukuran terhadap Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2021 mempunyai Target yaitu **10,945** Tahun dan terealisasi sebesar **10,97** Tahun.

2. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

Definisi : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, Harapan Lama Sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam. Hasil Pengukuran terhadap Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 terealisasi sebesar **14,70%** dari target yang ditetapkan **15,37%** dan capaian kinerja sangat baik sebesar **95,64%**.



Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda” memiliki 2 indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Tingkat Capaian Kota Layak Anak serta Pemuda Berprestasi.

1. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Berdasarkan data, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Bandar Lampung telah menempati posisi cukup baik dibandingkan kabupaten Kota lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 3.7

INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) MENURUT KOMPONEN DAN KABUPATEN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 DAN 2020

No	Kabupaten / Kota	IDG 2019	IDG 2020	IPG 2019	IPG 2020
	PROPINSI LAMPUNG	69,23	69,06	90,39	90,33
1	Lampung Barat	68,21	68,24	92,55	92,95
2	Tanggamus	56,98	56,80	90,88	91,13
3	Lampung Selatan	59,40	59,59	89,54	89,60
4	Lampung Timur	63,42	63,13	88,78	88,83
5	Lampung Tengah	62,22	61,96	89,88	89,87
6	Lampung Utara	64,86	65,21	89,48	89,46
7	Way Kanan	61,46	60,72	88,22	88,19
8	Tulang Bawang	65,94	64,10	89,17	89,31
9	Pesawaran	72,59	72,21	87,30	87,20
10	Pringsewu	67,05	67,32	92,37	92,33
11	Mesuji	69,27	68,89	84,22	84,17
12	Tulang Bawang Barat	51,46	51,25	88,45	88,56

13	Pesisir Barat	56,21	56,02	93,22	93,27
14	Kota Bandar Lampung	71,54	71,88	93,96	93,86
15	Kota Metro	77,02	76,98	95,02	95,55

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka IDG yang terlihat pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Pada tahun 2020 Kota Bandar Lampung masuk dalam urutan ke 3 tertinggi dari 15 Kabupaten / Kota. Dengan kata lain, perempuan Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri. Sebagai salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung meningkatkan IDG dengan melakukan program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan, untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Pelatihan yang diberikan kepada Perempuan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat dikembangkan dan pada akhirnya dapat memberikan sumbangan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya. Pemberdayaan perempuan tersebut mampu meningkatkan pencapaian IDG, terlihat pada tahun 2020 IDG Kota Bandar Lampung meningkat sebesar 0,34 dari tahun sebelumnya menjadi 71,88. Kondisi ini memberikan gambaran perempuan di Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri.

Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 mempunyai target sebesar **93,87** dan terealisasi sebesar **93,86** dengan capaian kinerja kategori Baik yaitu sebesar **99,98%**.

2. TINGKAT CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK

Predikat Kota Layak Anak diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. kepada Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota sebagai Penghargaan bagi Pemerintah yang telah mewujudkan komitmennya terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta lingkungan yang ramah anak di Daerahnya.

Penilaian Kota Layak Anak dilakukan melalui beberapa tahapan : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai

Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Pada tahun 2021 Tingkat Capaian Kota Layak Anak ditargetkan mendapatkan predikat Madya (nilai : 601-700) dan terealisasi dengan mendapatkan predikat Madya (hasil penilaian 642,5), oleh karena itu capaian kinerjanya termasuk kategori Baik yaitu sebesar **100%**

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Angka Capaian	642.5	Madya

Keterangan : Angka Capaian Hasil Evaluasi

Angka Capaian 500 s/d 600 = KLA Pratama

Angka Capaian 601 s/d 700 = KLA Madya

Angka Capaian 701 s/d 800 = KLA Nindya

Angka Capaian 801 s/d 900 = KLA Utama

Angka Capaian 901 s/d 1000 = Kota Layak Anak

3. PEMUDA BERPRESTASI

Dalam rangka mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Pemuda Berprestasi telah membuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung. Akan tetapi akibat adanya pandemic covid 19 maka beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan 100%.

Berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada organisasi pemuda yang aktif dengan target 85% capaian pada tahun 2021 yaitu jumlah organisasi pemuda yang ada di Kota Bandar Lampung berjumlah 95 OKP. Selama pandemi Covid 19 tidak ada kegiatan atau aktifitas dalam bidang Kepemudaan (Pelatihan dan Lain-lain) walaupun ada kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Online (Zoom Meeting). Ada beberapa pelatihan kepemudaan di Tingkat Provinsi dengan jumlah peserta terbatas dan dengan Protokol Kesehatan yang ketat.

Pelatihan dan pembinaan pada peningkatan jumlah kegiatan organisasi kepemudaan dengan target 100% yang dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu pada kegiatan seleksi dan pembinaan paskibra tingkat kecamatan dan Kota Bandar Lampung berjumlah 80 orang tercapai 85%. Peserta tersebut berasal dari sekolah menengah atas (SMA/SMK) negeri dan swasta se-Kota Bandar Lampung, dari 80 orang tersebut yang lulus sebanyak 37 orang untuk Pengibaran Bendera di Kota Bandar Lampung, dan yang lulus mewakili Kota Bandar Lampung ke Tingkat Provinsi sebanyak 4 orang terdiri dari 1 perempuan dan 3 laki-laki.

Selanjutnya berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada pembinaan olahraga Perwosi dengan target 100% dan capaian pada tahun 2021 adalah 25.57% dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

Dengan keadaan tersebut maka IKU Pemuda Berprestasi Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 2,92% capaian kinerjanya terealisasi sebesar 100%



Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap

PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN DALAM KONDISI MANTAP

Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat dapat meningkatkan persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Target kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar **85,31%** dan dapat terealisasikan dengan sangat baik dan melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar **85,60%** sehingga capaian kinerjanya sebesar **111,29%**.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi pada kegiatan ini adalah masih terjadinya kelebihan kapasitas penggunaan jalan, baik berat maupun jumlahnya. Hal ini harus selalu dikoordinasikan dengan pihak yang terkait sehingga kondisi jalan dapat terjaga dan tidak cepat rusak.



Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya Pengendalian Banjir” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase Daerah Rawan Banjir.

PERSENTASE DAERAH RAWAN BANJIR

Dalam rangka mengurangi daerah yang termasuk rawan banjir Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pembangunan Drainase yang dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. Persentase tingkat keberhasilan kegiatan ini mencapai **98,33%** dari target yang telah ditentukan sebesar **55,00%** dan terealisasi sebesar **54,08%**. Permasalahan yang masih dihadapi pada kegiatan ini masih adanya penumpukan sampah rumah tangga yang mengakibatkan penyumbatan aliran air drainase yang menyebabkan peluapan air pada saat hujan. Hal ini harus selalu dikoordinasikan dengan pihak yang terkait sehingga kondisi drainase dapat terjaga dan aliran air tidak tersumbat.



Sasaran Strategis 6 “Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak” memiliki 2 indikator kinerja utama yaitu RTLH Yang Tertangani Pertahun dan Persentase Kawasan Kumuh.

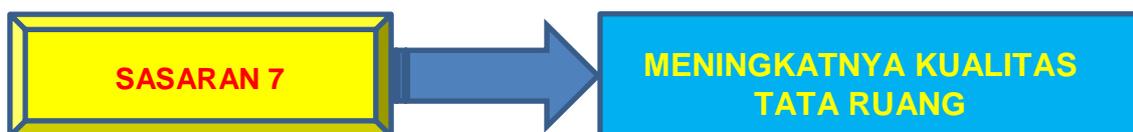
1. RTLH YANG TERTANGANI PERTAHUN

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran terkait RTLH Yang Tertangani Pertahun dengan penetapan target sasaran sebesar **32,68%**. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha dan Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan cara terlaksananya BPS Kota Bandar Lampung sebanyak 924 RTLH serta terlaksananya BPS Kota Bandar Lampung sebanyak 924 RTLH di 24 Kelurahan. Rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut telah merealisasikan capaian target sebesar **31,20%**. Capaian kinerja dalam pelaksanaan indikator kinerja utama adalah sebesar **95,47%** kategori Baik.

2. PERSENTASE KAWASAN KUMUH

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh telah melaksanakan pengurangan luasan kumuh di Kota Bandar Lampung Sebesar 37,47 Ha sehingga luasan kumuh di Kota Bandar Lampung menjadi 259,78 Ha.

Capaian kinerja dalam merealisasikan persentase kawasan kumuh adalah sebesar 88,03% dengan perhitungan dari target yang ditetapkan sebesar 1,17% terealisasi sebesar 1,31%.



Sasaran Strategis 7 “Meningkatnya Kualitas Tata Ruang” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG SESUAI RTRW

Target yang telah ditentukan dalam pencapaian indikator kinerja utama Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW adalah sebesar 54,14% dan dapat terealisasi sangat baik dengan persentase sebesar 54,26% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,2%.

Dengan capaian kinerja berupa terlaksananya fasilitasi penyusunan Perda RTDRK 1 Paket Updating Peta Tematik, 55 Objek yang mengikuti aturan dari 94 Objek yang dilakukan pengawasan. Dan terlaksananya 12 Bangunan yang menyalahi RTRW di 8 Kecamatan. Serta 19 Rekomendasi yang dikeluarkan di dalam Rapat BKPRD.

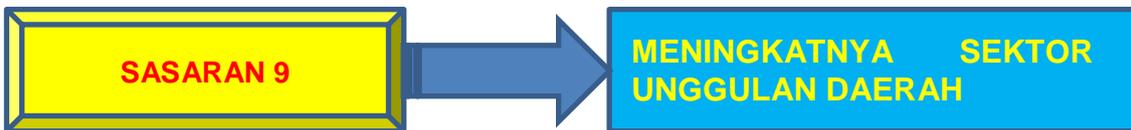


Sasaran Strategis 8 “Menurunnya Masalah Kemacetan” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan.

PERSENTASE TITIK KEMACETAN YANG TERSELESAIKAN

Permasalahan kemacetan di beberapa titik wilayah Kota Bandar Lampung terjadi pada jam sibuk pagi-sore serta terjadi di lingkungan pasar tradisional. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah mengaktifkan petugas Pengamanan dan Pengaturan (PAMTUR Lalu Lintas) pagi dan sore hari di lokasi rawan kemacetan lalu lintas sehingga terciptanya lalu lintas yang lancar.

Dengan adanya kegiatan PAMTUR Lalu Lintas tersebut sedikit banyak mengurangi titik kemacetan yang sering terjadi di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung. Persentase titik kemacetan yang terselesaikan adalah sebesar **40%** dari target yang ditentukan sebesar **40%** sehingga capaian kinerja pada indikator kinerja utama ini adalah sebesar **100%**



Sasaran Strategis 9 “Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah” memiliki 5 indikator kinerja utama yaitu Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB, Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB, Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB, Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya, Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat.

KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB

Pada Tahun 2021 persentase kategori industri pengolahan terhadap PDRB Target **21.10%**, Realisasi **21,09%**, dengan persentase pencapaian **99,95%**, dengan pencapaian realisasi baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (21,39%) maka terjadi penurunan, hal ini dikarenakan dampak dari adanya Covid-19 dan Kenaikan sektor lainnya seperti Informasi dan Komunikasi. Nilai tambah industri pengolahan cenderung turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 nilai tambah industri pengolahan sebesar 12 968,66 (miliar rupiah) sedangkan Tahun 2020 nilai tambah industri pengolahan sebesar 12268,10 (miliar rupiah). Pada Tahun 2021, angka PDRB yang dihasilkan Kota Bandar Lampung sebesar 61 502,42 (miliar rupiah).

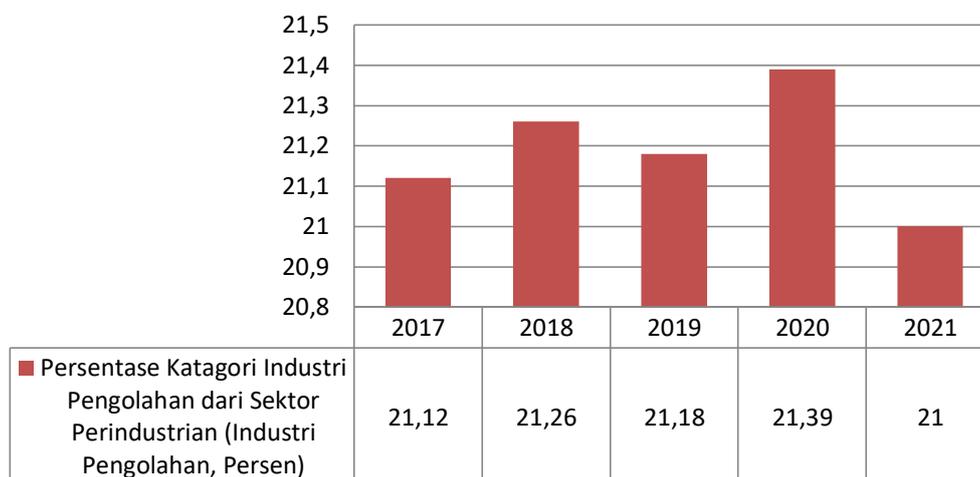
Pencapaian angka PDRB yang menurun selama 2 tahun terakhir dan menurun pada tahun 2021 menunjukkan keadaan perekonomian yang kurang baik yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 21%. Angka realisasi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB. bersumber dari PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2021 (*BPS Kota Bandar Lampung*).

Persentase Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB tahun 2021 (**21,09%**) jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 21,45% persentase pencapaian **98,32%**.

Realisasi persentase kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB tahun 2021, dan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik. 3.2

PERSENTASE KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB (INDUSTRI PENGOLAHAN, PERSEN)



Tabel 3.8

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (MILIAR RUPIAH), 2017–2021

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2044,98	2102,51	2180,13	2 213,98	2 283,14
B. Pertambangan dan Penggalan	1698,31	1837,43	1976,42	2 096,37	2 040,72
C. Industri Pengolahan	10648,79	11567,14	12594,05	12 268,10	12 968,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	55,40	60,15	65,47	68,53	70,28
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	143,40	150,19	158,99	168,09	181,28
F. Konstruksi	5356,49	6038,85	6482,85	6 466,41	7 021,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7104,71	7729,91	8547,72	7 853,15	8 487,47
H. Transportasi dan Pergudangan	6 873,09	7452,01	8016,24	7 821,85	8 073,83

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 412,87	1 556,06	1714,61	1 515,81	1 531,97
J. Informasi dan Komunikasi	2 859,29	3 205,69	3491,19	3 782,84	3 892,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2643,66	2802,23	2943,19	3 011,42	3 138,45
L. Real Estate	2819,24	3170,49	2533,37	3 550,98	3 616,49
M,N. Jasa Perusahaan	181,32	198,93	211,44	208,75	210,78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2881,85	3091,13	3262,63	3 482,25	3 535,94
P. Jasa Pendidikan	1571,93	1709,71	1893,30	2 156,16	2 196,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	946,54	1016,22	1101,78	1 238,32	1 294,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	840,96	920,52	1030,68	967,14	959,19
PDRB	50082,84	54609,16	59203,98	58 870,14	61 502,42

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2017-2021

Persentase katagori Industri pengolahan terhadap PDRB Tahun 2021 :

$\frac{\text{Jumlah PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100 \%$

$\frac{12.968,66 \text{ (Miliar Rupiah)}}{61 502,42 \text{ (Milliar Rupiah)}} \times 100\% = 21,1\%$

2. KONTRIBUSI PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

Realisasi Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB mempunyai target sebesar 13,65%, menurut BPS untuk realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 13,80% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 101,1%. Kontribusi perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 8 487,47 (miliar rupiah) dari PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2021 sebesar 61 502,42 (miliar rupiah)

3. KONTRIBUSI JASA, PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM TERHADAP PDRB

Kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum perdagangan terhadap PDRB terdiri dari :

1. Jasa keuangan dan asuransi sebesar 3.138,45 (miliar rupiah) atau 5,10% dari PDRB.
2. Jasa perusahaan sebesar 210,78 (miliar rupiah) atau 0,34% dari PDRB.
3. Jasa pendidikan sebesar 2.196,50 (miliar rupiah) atau 3,57% dari PDRB;
4. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1.294,52 (miliar rupiah) atau 2,10% dari PDRB;
5. Jasa Lainnya sebesar 959,19 (miliar rupiah) atau 1,56% dari PDRB
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1.531,97 (miliar rupiah) 2,49% dari PDRB.

Dilihat dari uraian diatas maka total kontribusi Jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 9.331,41 (miliar rupiah) atau 15,16% dari PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2021 yang sebesar 61.502,42 (miliar rupiah). Persentase capaian tahun 2021 kategori baik yaitu 15,16% dari target 15,33% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 98,89%

4. PERSENTASE UMKM YANG MENINGKAT LABANYA

Jumlah UMKM yang meningkat labanya pada tahun 2021 sebanyak 430 UKM sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 350 UKM. Target indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya sebesar **26,30%** terealisasi sebesar **22,64%** sehingga capaian persentase **86,08%**.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2020 jumlah UMKM yang meningkat labanya sebesar 104,81% dan dibandingkan pada akhir renstra tercapai sebesar 50,65% dari target akhir renstra sebesar 44,70%. Tingkat kemajuan yang ditunjukkan oleh persentase UMKM yang meningkat labanya pada tahun ini sudah mendekati target akhir Renstra dan sekitar 22,06% lagi yang harus dicapai sehingga dapat memenuhi target Renstra. Dengan periode Renstra yang masih 4 tahun lagi memunculkan angka optimis untuk pemenuhan target akhir Renstra. Perkembangan jumlah UMKM yang meningkat labanya selama dua tahun terakhir mengalami kenaikan meskipun sangat kecil.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa besar capaian tersebut dipengaruhi oleh peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung perkembangan UKM di Kota Bandar Lampung berupa penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui Bank Waway untuk Penyaluran Kredit Ekor (ekonomi Kerakyatan), Melalui KUR dan kemitraan dengan BUMN. Sehingga peran Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terhadap para pelaku UMKM dapat memberikan kontribusi baik dari keterampilan SDM, SDA, dan modal usaha

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\text{“(Jumlah UMKM yang meningkat labanya / jumlah UMKM dalam pengawasan) x 100%”}$$

Tabel 3.9

**JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT LABANYA
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 S/D 2021**

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah UMKM yang meningkat labanya	400	430
Jumlah UMKM yang dalam pengawasan	1.899	1.899
Persentase UMKM yang meningkat labanya	21,06	22,64

5. PERSENTASE KOPERASI SEHAT DAN CUKUP SEHAT

Pada Tahun 2021 dari total jumlah koperasi yang ada sebanyak 410 unit koperasi dan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 66 unit koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah koperasi yang ada sebanyak 664 unit koperasi dengan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 55 unit koperasi, sehingga terdapat kenaikan 7 unit koperasi sehat dan cukup sehat dari tahun 2020. Capaian Koperasi sehat dan cukup sehat pada tahun 2021 sebesar 94,87% dari target 16,96% dapat terealisasi dengan baik sebesar 16,09%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 104,81% dari realisasi tahun 2020 sebesar 21,06%. Jika dibandingkan terhadap akhir Renstra (44,70%) capaian sebesar 50,65%.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$“(Jumlah koperasi sehat / Seluruh jumlah koperasi) \times 100\%”$$

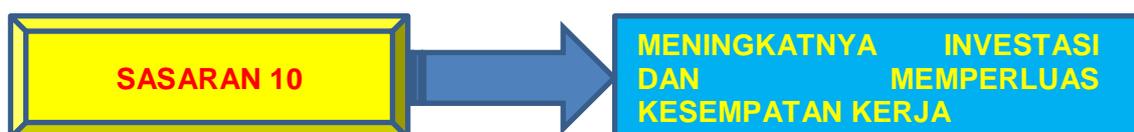
Adapun parameter yang digunakan untuk menghitung persentase koperasi sehat dan cukup sehat adalah koperasi tersebut menjalankan usahanya dengan baik, yaitu dari sisi kelembagaan maupun manajerial sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yaitu dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang selanjutnya digunakan dalam proses perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

. Tabel 3.10

**TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KOPERASI SEHAT
TAHUN 2016 S/D 2021**

Tahun	Perbandingan		
	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Sehat
2016	740	355	20
2017	741	313	23
2018	744	158	30
2019	662	167	40
2020	664	176	55
2021	410	194	66

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung



Sasaran Strategis 10 “Meningkatnya Investasi Dan Memperluas Kesempatan Kerja” memiliki 3 indikator kinerja utama yaitu Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN), Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

1. PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMDN)

Realisasi PMDN Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 sebesar **57,45%** dari target **15,49%** dengan capaian kinerja sebesar **370%**. Pada Tahun 2021 PMDN Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan sebesar 57,45% dibandingkan dengan tahun 2020, jika pada tahun 2020 PMDN terealisasi sebesar Rp.2.210.330.624.677,00 maka pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.3.480.180.424.677,00.

Perhitungan pertumbuhan nilai investasi PMDN dapat dilihat seperti di bawah ini:

$$\frac{(\text{Realisasi PMDN 2021} - \text{Realisasi PMDN 2020}) \times 100 \%}{\text{Realisasi PMDN 2020}}$$

$$\frac{\text{Rp. 3.480.180.424.677} - \text{Rp. 2.210.330.624.677} \times 100\%}{\text{Rp. 2.210.330.624.677}} = 57,45\%$$

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET PMDN TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
			(%)	(%)	(%)
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	15,49	57,45	14,99

Dari tabel di atas, dapat dilihat perbandingan Capaian Kinerja PMDN pada tahun **2021** dengan Capaian Kinerja PMDN Tahun **2020** mengalami kenaikan sebesar **42.46%**.

2. PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMA)

Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA) Kota Bandar Lampung pada Tahun **2021** mengalami peningkatan **7,5%** dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 75.696.200 (US Dollar), jika pada tahun 2020 PMA sebesar 630.598.514,00 (US Dollar) menjadi 706.294.714 (US Dollar).

Target PMA pada tahun 2021 adalah sebesar **4,55%** dan dapat terealisasi sebesar **12%** dengan begitu capaian kinerjanya adalah sebesar **263%** dengan kategori sangat baik

Perhitungan Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA) dapat dilihat seperti di bawah ini:

$$\frac{(\text{Realisasi PMA 2021} - \text{Realisasi PMA 2020}) \times 100 \%}{\text{Realisasi PMA 2020}}$$

$$\frac{\text{US\$ } 706.294.714 - \text{US\$ } 630.598.514 \times 100\%}{\text{US\$ } 630.598.514} = 4,05\%$$

Tabel 3.12

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET PMA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019
			(%)	(%)	(%)
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,55	12	4,05

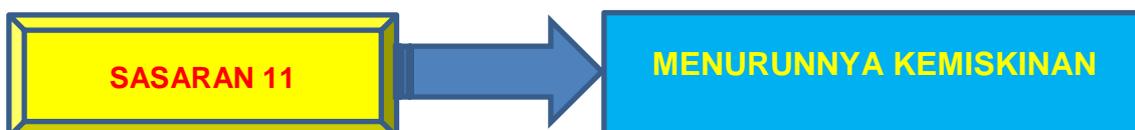
Dari tabel di atas, dapat dilihat perbandingan Capaian Kinerja PMA pada tahun **2021** dengan Capaian Kinerja PMA Tahun **2020** mengalami kenaikan sebesar 7,5%.

1. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. TPT berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 adalah sebesar **8,78%** dan terealisasi sebesar **8,85%** dengan capaian kinerja sebesar **99,77%**. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut berikut:

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
TPT	8,10	7,28	7,12	8,79	8,85

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, 2021



Sasaran Strategis 11 “Menurunnya Kemiskinan” memiliki 2 indikator kinerja utama yaitu Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita Penduduk

3. PERSENTASE PENDUDUK DIATAS GARIS KEMISKINAN

Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makana. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Berdasarkan data BPS 2021 persentase jumlah penduduk miskin Kota Bandar Lampung adalah sebesar 9,11%

Adapun rumus perhitungan persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah :

$$100\% - \text{persentase jumlah penduduk miskin}$$

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan : $100\% - 9,11\% = 90,85\%$

Target persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 adalah sebesar **91,29%** dengan realisasi sebesar **90,85%** maka capaian kinerjanya baik yaitu sebesar **99,5%**.

4. PENDAPATAN PER KAPITA PENDUDUK

Pendapatan perkapita Daerah adalah jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu Negara atau wilayah geografis. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.

Rumus perhitungan pendapatan perkapita penduduk Daerah :

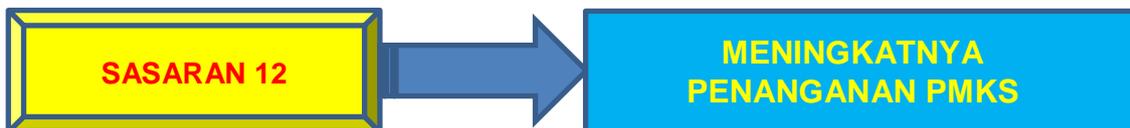
$$\frac{\text{PDRB harga konstan}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Berdasarkan data BPS 2021 bahwa PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di kota Bandar Lampung adalah sebesar 61.502,42 (milliar rupiah) dan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 1.184.949.

Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2021:

$$\frac{61.502,42 \text{ (milliar rupiah)}}{1.184.949} \\ = \text{RP. } 51.903.010,-$$

Dilihat dari hasil perhitungan diatas maka pendapatan perkapita penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebesar **Rp.51.903.010,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp.51 – 53** Juta maka capaian kinerjanya mencapai **100%**.



Sasaran Strategis 11 “Meningkatnya Penanganan PMKS” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase PMKS yang tertangani.

PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI

PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan permasalahan PMKS dapat tertangani sebesar **74,00%** dan dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar **63,06%** atau capaian kinerjanya termasuk kategori baik yaitu sebesar **85,21%**. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada sasaran meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.



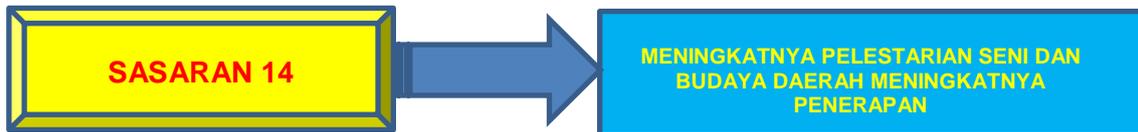
Sasaran Strategis 13 “Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama” memiliki 2 Indikator Kinerja Utama Yaitu Angka Kriminalitas Yang Tertangani dan Persentase Konflik Sosial, Keagamaan Dan Ras Yang Tertangani

ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI

Berbicara tentang hakekat gangguan kamtibmas, maka faktor fundamental yang perlu kita bicarakan adalah Kriminalitas. Target angka kriminilitas yang tertangani pada tahun 2021 adalah sebesar **1411 kejadian** dan dapat terealisasikan sebesar **1630 kejadian** sehingga capaian Kinerja sebesar **115,52%**.

2. PERSENTASE KONFLIK SOSIAL, KEAGAMAAN DAN RAS YANG TERTANGANI

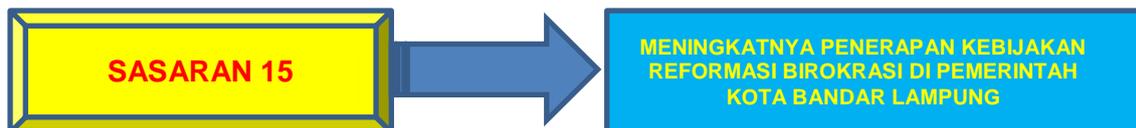
Pada tahun 2021 persentase konflik sosial, keagamaan dan RAS yang tertangani oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebesar **100%** dari jumlah target yang ditetapkan sebesar **78%** seluruhnya dapat tertangani dengan sangat baik.



Sasaran Strategis 14 “Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan” memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yaitu Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN

Terdapat 5 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang selalu menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjaga kelestariannya. Untuk tahun 2021 target capaiannya adalah **25%** dan terealisasi sebesar **25%** sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar **100%**.



Sasaran Strategis 15 “Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah kota Bandar Lampung” memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks RB (Reformasi Birokrasi).

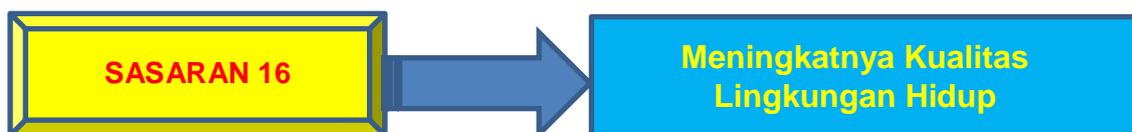
INDEKS RB (REFORMASI BIROKRASI)

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bandar Lampung tahun 2020-2021. Akan tetapi Nilai (Indeks RB) hasil evaluasi tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu sementara ini Nilai Indeks RB yang disampaikan

adalah Indeks RB tahun 2020 yaitu dengan peroleh Nilai **59,98 (CC)**. Apabila dibandingkan dengan target Nilai Indeks RB tahun 2021 sebesar **60,05** maka capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar **99%**.

Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional dan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung serta menjalankan rekomendasi hasil penilaian evaluasi pelaksanaan RB tahun sebelumnya.

Meskipun Indeks RB Tahun 2021 belum tersedia datanya dari Kementrian RB, namun Pemerintah Kota Bandar Lampung meyakini bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pada Tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan Tahun lalu, mengingat Penyederhanaan Birokrasi baik melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan struktural ke dalam Jabatan Fungsional serta system Kerja ASN telah dilakukan pada Tahun 2021. Selain itu pelayanan public, tata laksana dan pengawasan telah dilakukan secara baik sesuai dengan Peraturan yang berlaku.



Sasaran Strategis 16 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 1 Indikator Kinerja Utama Yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota :

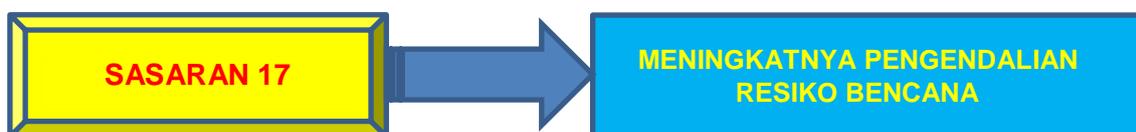
$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL).$$

Dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdapat beberapa indikator kinerja seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kegiatan yang mendukung untuk mencapai target Indeks Kualitas Air dengan target 60,64 di tahun 2021 yaitu berupa pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Perhitungan Indeks Pencemaran Air meliputi :

Status Mutu Air Sungai	Jumlah Sungai	Persen	Koefisien	Koefisien
Memenuhi	11	68,75	70	48,13
Ringan	5	31,25	50	15,63
Sedang	0	0	30	0
Berat	0	0	10	0
Jumlah	16	100		63,75
Nilai Indeks Pencemaran Air				0

Target output Indeks Kualitas Air **60,64** dan terealisasi sebesar **63,75** di tahun 2021. Sehingga Indeks Kualitas Air melebihi target di tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 105,1%. Adapun Permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Air antara lain sungai-sungai di Kota Bandar Lampung debit airnya kecil dan dalam kondisi tercemar, belum ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik terpadu.



Sasaran Strategis 17 “Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks Resiko Bencana.

Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko bencana tahun 2021 belum di *release* oleh BNPB Pusat, namun selama ini penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah baik. Untuk itu, pemerintah Kota meyakini bahwa Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 di Kota Bandar Lampung akan menurun karena penanganan bencana telah dilakukan dengan cara mitigasi, pencegahan dan penyelamatan terhadap resiko bencana. Penanganan bencana dilakukan dalam upaya memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Kinerja Keuangan Daerah tahun 2021, sebagaimana dituangkan didalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kinerja Pendapatan

Target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah dapat dicapai dengan baik, Jumlah realisasi pendapatan tahun 2020 adalah 75,72% yaitu sebesar Rp. 2.127.749.572.151,91 dari target pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.809.974.681.768,00

Adapun sumber pendapan daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah .

Pada tahun 2021 terealisasi 49,67% yaitu sebesar Rp.564.289.613.747,91,- dari target tahun 2021 sebesar Rp.1.135.584.810.227,00,- .

2) Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pada tahun 2021 terealisasi 100% lebih yaitu sebesar Rp.1.354.854.252.522,00,- dari target sebesar Rp.1.354.817.555.000,00,-

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar Daerah terealisasi 51,82% yaitu sebesar Rp.108.035.619.732,00,- dari target sebesar Rp.208.443.695.368,00,-

3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pada tahun 2021 terealisasi 90,49% yaitu sebesar Rp.100,570,086,150.00,- dari target tahun 2021 sebesar Rp.111,128,621,173.00,- .

Adapun rincian perbandingan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran pendapatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021


PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3
4.	PENDAPATAN DAERAH	2,809,974,681,768.00	2,127,749,572,151.91	(682,225,109,616.09)	(24.27
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,135,584,810,227.00	564,289,613,747.91	(571,295,196,479.09)	(50.30
4.1.01.	Pajak Daerah	679,900,000,000.00	416,921,523,707.00	(262,978,476,293.00)	(38.67
4.1.02.	Retribusi Daerah	106,896,850,000.00	22,099,157,927.00	(84,797,692,073.00)	(79.32
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47,000,000,000.00	22,972,960,178.78	(24,027,039,821.22)	(51.12
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	301,787,960,227.00	102,295,971,935.13	(199,491,988,291.87)	(66.10
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,563,261,250,368.00	1,462,889,872,254.00	(100,371,378,114.00)	(6.42
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,354,817,555,000.00	1,354,854,252,522.00	36,697,522.00	0.00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208,443,695,368.00	108,035,619,732.00	(100,408,075,636.00)	(48.17
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	111,128,621,173.00	100,570,086,150.00	(10,558,535,023.00)	(9.50
4.3.01.	Pendapatan Hibah	12,500,000,000.00	3,450,586,150.00	(9,049,413,850.00)	(72.39
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	98,628,621,173.00	97,119,500,000.00	(1,509,121,173.00)	(1.53
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,809,974,681,768.00	2,127,749,572,151.91	(682,225,109,616.09)	(24.27

Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung 2021

3.5. KINERJA BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran belanja Daerah Kota Bandar Lampung terealisasi 70,82% sebesar Rp.2.018.391.119.974,21,- dari rencana anggaran belanja Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021 sebesar Rp.2.849.790.114.635,84,-.

Adapun belanja daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021 terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi pada tahun 2021 terealisasi 76,36% yaitu sebesar Rp.1.593.087,342,619.21,- dari rencana anggaran belanja operasi pada tahun 2021 sebesar Rp.2.086.065.900.713.69,-.
- 2) Belanja Modal untuk tahun 2021 terealisasi 54,62% yaitu sebesar Rp.400.783.886.158,00,- dari rencana anggaran belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp.733.724.213.922,15,-.

- 3) Belanja Tidak Terduga untuk tahun 2021 terealisasi 100% yaitu sebesar Rp.24,519,891,197.00,- dari rencana anggaran belanja tidak terduga tahun 2021 sebesar Rp.30.000.000.000,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel realisasi belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14

**REALISASI BELANJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rp)

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG
				JUMLAH
1	2	3	4	5 = 4-3
5.	BELANJA DAERAH	2,849,790,114,635.84	2,018,391,119,974.21	(831,398,994,661.63)
5.1.	BELANJA OPERASI	2,086,065,900,713.69	1,593,087,342,619.21	(492,978,558,094.48)
5.1.01.	Belanja Pegawai	885,032,866,954.84	845,890,462,056.11	(39,142,404,898.73)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,129,130,208,758.85	694,849,885,185.10	(434,280,323,573.75)
5.1.03.	Belanja Bunga	17,735,375,000.00	15,119,791,378.00	(2,615,583,622.00)
5.1.05.	Belanja Hibah	41,427,450,000.00	27,731,375,400.00	(13,696,074,600.00)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	12,740,000,000.00	9,495,828,600.00	(3,244,171,400.00)
5.2.	BELANJA MODAL	733,724,213,922.15	400,783,886,158.00	(332,940,327,764.15)
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93,314,904,619.65	66,056,651,444.00	(27,258,253,175.65)
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300,579,342,454.00	169,003,826,345.00	(131,575,516,109.00)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	330,674,327,422.50	162,701,972,995.00	(167,972,354,427.50)
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,655,639,426.00	3,021,435,374.00	(5,634,204,052.00)
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	30,000,000,000.00	24,519,891,197.00	(5,480,108,803.00)
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	30,000,000,000.00	24,519,891,197.00	(5,480,108,803.00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,849,790,114,635.84	2,018,391,119,974.21	(831,398,994,661.63)

SUMBER: BPKAD KOTA BANDAR LAMPUNG, 2021

3.6. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan dari 77,48 pada tahun 2020 menjadi 77,58. Meskipun secara *aggregate* terlihat ada peningkatan yang kecil tetapi secara akumulatif memberikan angin segar kepada Pemerintah karena di tengah kondisi Pandemi Covid 19, pergerakan ekonomi mulai tumbuh kearah positif dan kesempatan kerja mulai terbuka kembali sehingga peluang-peluang ini digunakan oleh Pemerintah secara baik dalam rangka menumbuhkan ekonomi kota. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari -1,88% pada tahun 2020, meningkat menjadi 3,07%.

Cakupan vaksin kepada petugas kesehatan, masyarakat, lanjut usia, anak-anak dan remaja baik vaksin dosis 1, dosis 2 maupun booster telah mencapai persentase yang tinggi baik untuk skala lokal maupun nasional. Adapun capaian vaksin di Kota Bandar Lampung untuk Dosis 1 sebesar 867.407 (99,10%), vaksin dosis 2 sebesar 736.025 (84,09%) dan Vaksin dosis 3 (booster) sebesar 97.711 mencapai 11,16%.

REKAPAN VAKSINASI SUMBER KPC-PEN

KATEGORI	TARGET	DOSIS -1	PERSENTASE	DOSIS -2	PERSENTASE	DOSIS -3	PERSENTASE	TOTAL	KET
SDM KESEHATAN	9,624	13,572	141.02%	13,181	137.0%	9,037	93.90%	35,790	Total yang sudah di Vaksin Dosis1 + Dosis2+ Dosis3 =
PETUGAS PUBLIK	51,548	113,117	219.44%	104,018	201.79%	11,398	22.11%	228,533	
LANSIA	93,548	57,554	61.52%	48,766	52.13%	11,652	12.46%	117,972	
ANAK-ANAK	111,025	84,427	76.04%	65,517	59.01%	0	0.00%	149,944	
MASY UMUM & RENTAN	610,066	471,294	77.25%	391,868	64.23%	64,795	10.62%	927,957	1,701,143
REMAJA	110,499	110,487	99.99%	96,937	87.73%	443	0.40%	207,867	97.18%
GOTONGROYONG	0	16,956		15,738		386		33,080	
TOTAL	875,285	867,407		736,025		97,711		1,701,143	
		99.10%		84.09%		11.16%			

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Pada Tahun 2021, pencapaian penghargaan dan *apresiasi* yang telah diraih Kota Bandar Lampung baik oleh pemerintah Pusat dan Lembaga Independen antara lain:

1. Kota Bandar Lampung meraih penghargaan pelayanan publik kategori Pelayanan Prima dibidang Pelayanan PTSP dan Catatan Sipil dengan predikat A oleh Kementrian Menpan RB;
2. Kota Bandar Lampung masuk dalam Zona Hijau dalam pelayanan publik oleh Ombudsman RI;
3. Kota Bandar Lampung meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Madya oleh Kementrian Pemberdayaan perempuan perlindungan anak RI;
4. Kota Bandar Lampung meraih Anugerah Parahita Eka Praya (APE) tingkat Madya oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI;

5. Kota Bandar Lampung mendapatkan Sertifikat Nasional Peringkat Ruang Bermain Ramah Anak pada RTH Taman Kalpataru oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan perlindungan anak RI;
6. Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan Riset dan Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas Indonesia oleh Institut Teknologi Bandung;
7. Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan PASTIKA PARAHITA dari Kementerian Kesehatan RI;
8. Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan kategori Dukungan dan Bantuan Vaksinasi bagi ASN.WBP dari Kementerian Hukum dan HAM;
9. Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan ADI KARSA MADYA dari ITERA.



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung serta dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Bandar Lampung dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan diharapkan lebih menyempurnakan implementasi akuntabilitas khususnya penetapan sasaran strategis dan indikator kerjanya yang dapat mengarahkan pencapaian Visi Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 yaitu “ **BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT**”. Dengan penyempurnaan implementasi akuntabilitas ini, diharapkan dapat terwujud transparansi, dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip good governance dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

LAKIP Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil pengukuran pada 31 Indikator Kinerja Utama Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. 12 Indikator atau 26 % dengan kategori Sangat Baik;
2. 16 Indikator atau 52% dengan kategori Baik;
3. 1 Indikator atau 6% dengan kategori Cukup.
4. 2 Indikator dengan kategori N/A (Belum Tersedia Data)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung 2021 ditetapkan 17 sasaran dengan 31 indikator sasaran, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. 8 Indikator atau 23% Melampaui target
2. 5 Indikator atau 16% Sesuai target
3. 16 Indikator atau 51% Belum mencapai target

Data Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Rawan Bencana belum release dari pemerintah Pusat, namun demikian pengendalian dan mitigasi bencana dapat diminimalisir di Kota Bandar Lampung sehingga kerugian masyarakat baik materiil maupun non materiil dapat ditekan. Kegiatan Reformasi birokrasi juga dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama dalam Penyederhanaan Birokrasi yang didengungkan oleh Presiden RI melalui penyederhanaan struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan Fungsional dan sisten Kerja ASN. Sehingga diharapkan birokrasi menjadi semakin efisien, professional dan akuntabel.

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja Daerah, diharapkan :

- Adanya dukungan baik dari perangkat Daerah, masyarakat maupun pemangku kepentingan.

- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Daerah yang sifatnya makro karena intervensi program Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bisa secara langsung meningkatkan capaian indikator kinerja Daerah.
- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021, semoga pencapaian kinerja Tahun ini merupakan pondasi lima tahun ke depan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Terima Kasih.

Bandar Lampung, 27 Maret 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

dto

EVA DWIANA

